

NIKAH MUT'AH DALAM PERSPEKTIF SUNNI DAN SYIAH



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan
Jurusan Peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

NUR AIMMAH
NIM. 10100114022

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUR AIMMAH
Nim : 10100114022
Tempat/Tgl. Lahir : Sinjai, 07 Oktober 1996
Jur/Prodi/Konsentrasi : Peradilan Agama
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul : Nikah Mut'ah dalam Perspektif Sunni dan Syi'ah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 7 November 2018
Penyusun,

NUR AIMMAH
NIM: 10100114022

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "NIKAH MUT'AH DALAM PERSPEKTIF SUNNI DAN SYI'AH". Yang disusun oleh Nur Aimmah, NIM: 10100114022, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munāqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 22 November 2018 M, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1440 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam ilmu Syari'ah dan Hukum, Jurusan Peradilan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 26 November 2018 M
18 Rabiul Awal 1440 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.

Sekretaris : Dr. Hj. Patimah, M.Ag.

Munaqisy I : Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.

Munaqisy II : Dr. Sohrah, M. Ag.

Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnaningsih, M.Ag.

Pembimbing II : H. Zulfahmi Alwi, M.Ag. Ph. D.

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.
NIP. 196210161990031003

KATA PENGANTAR



Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyusun skripsi ini sebagaimana mestinya. Shalawat serta salam senantiasa terucap untuk Nabiullah Muhammad saw yang telah membawa kebenaran hingga hari akhir.

Keberadaan skripsi ini bukan sekedar persyaratan formal bagi mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana tetapi lebih dari itu merupakan wadah pengembangan ilmu yang didapat dibangku kuliah dan merupakan kegiatan penelitian sebagai unsur Tri Darma Perguruan Tinggi. Dalam mewujudkan ini, penulis memilih judul **“Nikah Mut’ah dalam Perspektif Sunni dan Syi’ah”**.

Kehadiran skripsi ini dapat memberi informasi dan dijadikan referensi terhadap pihak-pihak yang menaruh minat pada masalah ini. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi semua pihak, baik dalam sugesti dan motivasi moril maupun materil. Karena itu penyusun berkewajiban untuk mengucapkan teristimewa dan penghargaan setinggi-tingginya kepada keluarga tercinta khususnya orang tua penulis, Ayahanda **Muhammad Alwi** dan **Rajemiati** yang senantiasa memberikan penulis curahan kasih

sayang, nasihat, perhatian, bimbingan, motivasi serta doa restu yang selalu diberikan sampai saat ini.

Secara berturut-turut penyusun menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si.** selaku Rektor UIN Alauddin Makassar;
2. Bapak **Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.** selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar beserta jajarannya;
3. Bapak **Dr. Supardin M.HI.** selaku Ketua Jurusan Peradilan Agama UIN Alauddin Makassar beserta ibu **Dr. Hj. Patimah, M.Ag.** selaku Sekertaris Jurusan Peradilan Agama;
4. Ibu **Dr. Hj. Nurnaningsih, M.A.** selaku Pembimbing I dan bapak **H. Zulfahmi Alwi, M.Ag., Ph.D.** selaku Pembimbing II. Kedua beliau, di tengah kesibukan dan aktifitasnya bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan petunjuk dan bimbingan dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak **Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.** selaku Penguji I dan Ibu **Dr. Hj. Sohrah, M.Ag** selaku Penguji II yang telah siap memberikan nasehat, saran dan perbaikan dalam perampungan penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen serta seluruh staf akademik dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar;

7. Kepada seluruh keluarga besarku yang tidak bosan medoakan dan memberi semangat kepada penulis sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.
8. Kepada **Fathurrahman** dan sepupu saya **Mutmainna** yang selalu membantu selama proses penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada sahabatku **Dwi Alfiana, Ika Irdayanti, S.H., Hesti Junilah Handayani, S.H., Dwi Juliana, S.H, Ratu Permatasari, S.H., Ratih Kusuma Intan, S.H., Arnila Amir, S.H., Sitti Hartina Ismaila, S.H., dan Sri Amanda Emilia.** yang slalu memberi memotivasi untuk segera menyelesaikan studi serta dukungan dan canda tawa yang menyisakan kesan yang mendalam di hati.
10. Seluruh teman kuliah Jurusan Peradilan Agama Angkatan 2014 Khususnya PA A dan semua teman-teman yang tidak sempat saya sebutkan dan telah memberikan pengalaman di 4 tahun perkuliahan yang sangat luar biasa, semoga Allah memberkahi setiap langkah di dalam hidup kita.
11. Seluruh teman KKN Desa Bukit Harapan, Kec. Gantarang Kab. Bulukumba. Selama ± 2 bulan bersama menjalani tugas akhir dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini.
12. Dan kepada seluruh teman-teman para pejuang skripsi jangan mudah menyerah, yakinlah usaha tidak akan menghianati hasil, Tuhan selalu bersama mahasiswa tingkat akhir.

Upaya maksimal telah dilakukan dalam menyusun skripsi ini. Oleh karena itu, kritik, dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga hasil penelitian ini

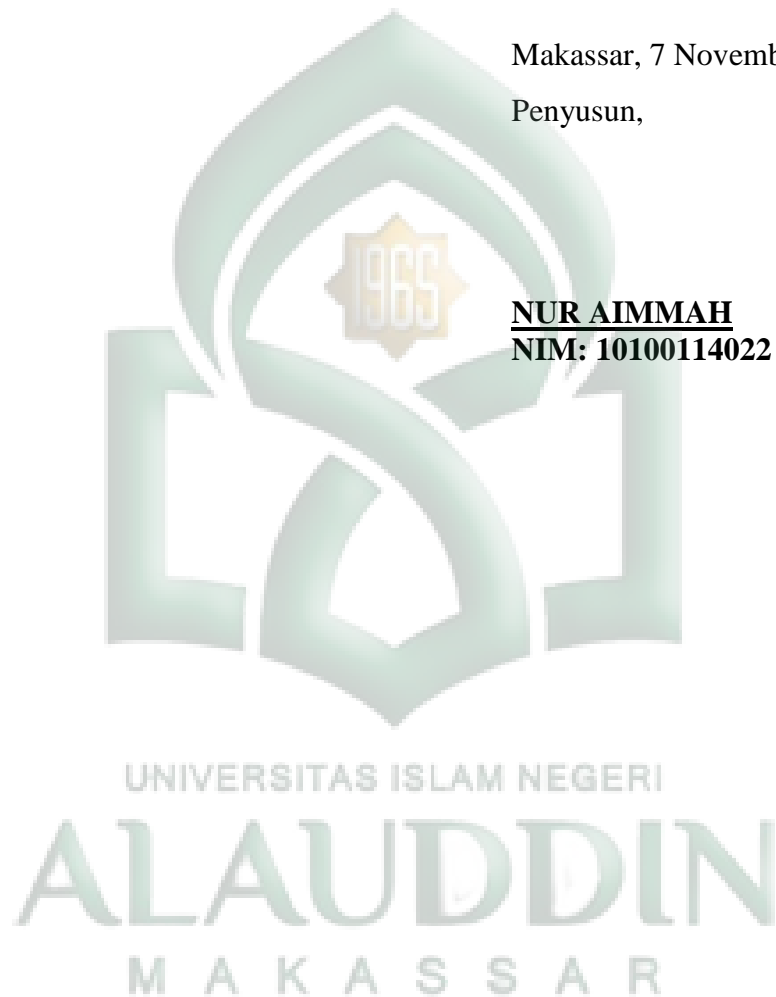
dapat bermanfaat bagi para pembaca yang budiman pada umumnya. *Amin yaa rabbalalam.*

Wassalamu Alaikum Wr.Wb.

Makassar, 7 November 2018

Penyusun,

NUR AIMMAH
NIM: 10100114022



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Pengertian Judul	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Metodologi Penelitian	10
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
BAB II LANDASAN HUKUM NIKAH MUT'AH PESPEKTIF SUNNI DAN SYI'AH	
A. Asal-usul Nikah Mut'ah	15
1. Pengertian Nikah Mut'ah	15
2. Perbedaan Nikah Mut'ah dan Nikah Daim	16
3. Asal-usul Nikah Mut'ah.....	18
B. Landasan Hukum Nikah Mut'ah Perspektif Sunni	22
C. Landasan Hukum Nikah Mut'ah Perspektif Syi'ah	28
BAB III ANALISIS PEMIKIRAN ULAMA SUNNI DAN SYI'AH TENTANG NIKAH MUT'AH	
A. Pandangan Ulama Sunni tentang Nikah Mut'ah.....	42
1. Pemikiran Yusuf al-Qardhawi	42
2. Pemikiran Jalaluddin al-Suyuti	45
3. Pemikiran Ibnu Katsir	48
B. Pandangan Ulama Syi'ah tentang Nikah Mut'ah.....	50

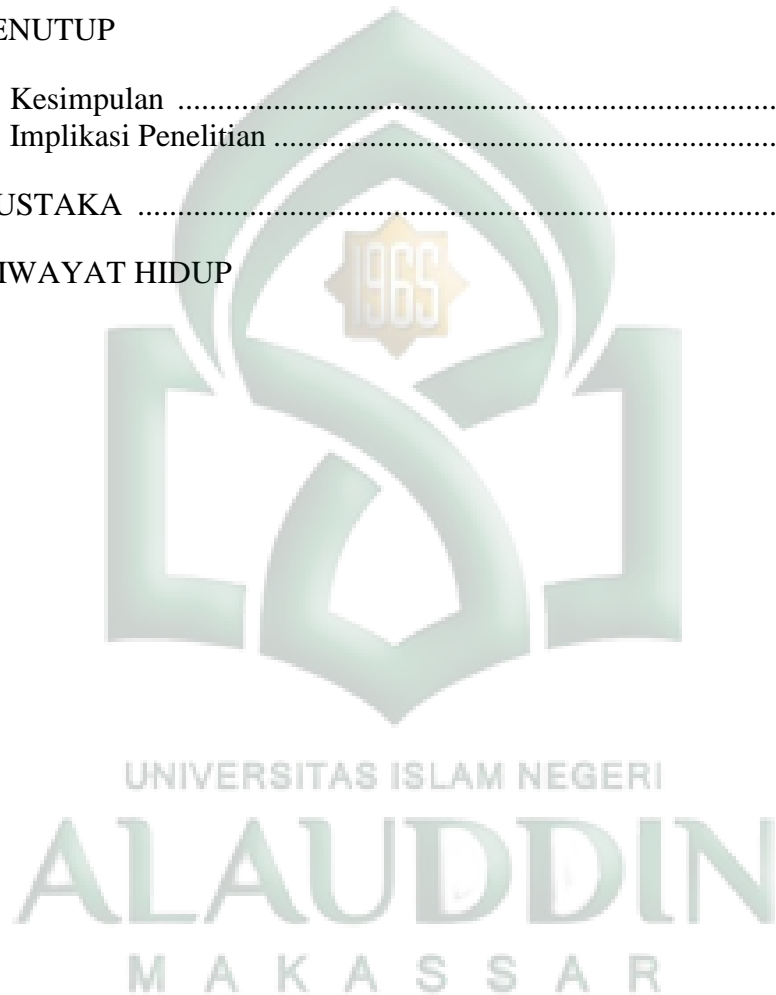
1. Pemikiran Muhammad Husein Thabathaba'i	50
2. Pemikiran Muhammad Husain Fadhlullah	53
3. Pemikiran Ayatullah Sayid Muhammad al-Musawi.....	59
C. Praktek Nikah Mut'ah pada Kalangan Syi'ah	64
D. Kemuskilan-kemuskilan dalam Nikah Mut'ah	75

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Implikasi Penelitian	83

DAFTAR PUSTAKA	84
----------------------	----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
----------------------------	--



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	x	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	a	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i	i
ُ	<i>Dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َئِ	<i>fathah dan yaa'</i>	ai	a dan i
َؤِ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... آ...	Fathah dan alif atau yaa'	a	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan yaa'	i	i dan garis di atas
و	Dhammah dan waw	u	u dan garis di atas

Contoh:

مات : *maata*

رَمَى : *ramaa*

قِيلَ : *qiila*

يَمُوتُ : *yamuutu*

4. Taa' marbuutah

Transliterasi untuk *taa' marbuutah* ada dua, yaitu *taa' marbuutah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah, dan dhammah*, transliterasinya adalah [t].sedangkan *taa' marbuutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *taa' marbuutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *taa' marbuutah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh :

الْأَطْفَالُ الرَّوَضَةُ : *raudah al- atfal*

الْفَاضِلَةُ الْمَدِينَةُ : *al- madinah al- fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid(ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonang anda) yang diberi tandasyaddah.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanaa*

نَجَّيْنَا : *najjainaa*

الْحَقُّ : *al- haqq*

نُعَمُّ : *nu"ima*

عُدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ) maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah* menjadi i.

Contoh :

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilaadu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'muruuna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمِرْتُ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *Al-Qur'an*), al-hamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fizilaal Al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. *Lafz al- Jalaalah (الله)*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِئَاللهِ *diinullah* بِاللهِ *billaah*

Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalaalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillaah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul refrensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh:

Wa ma muhammadun illaa rasul

Inna awwala baitin wudi' alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan

Syahru ramadan al-lazii unzila fih al-Qur'an

Nazir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al- Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-Walid Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

swt	= <i>subhanallahu wata'ala</i>
saw	= <i>sallallahu 'alaihi wasallam</i>
a.s	= <i>'alaihi al-sallam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS.../...4	= QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4
HR	= Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut :

ص	= صفحة
دم	= بدون مكان
صلعم	= صلى الله عليه و سلم
ط	= طبعة
دن	= بدون ناشر
الخ	= الى اخرها / الى اخره
ج	= جزء



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama : Nur Aimmah

Nim : 10100114022

Judul : Nikah Mut'ah dalam Perspektif Sunni dan Syi'ah

Skripsi ini membahas tentang Nikah Mut'ah dalam Perspektif Sunni dan Syi'ah. Yang bertujuan untuk mengetahui, 1) landasan hukum nikah mut'ah perspektif Sunni dan Syi'ah. 2) perbedaan pemikiran ulama Sunni dan Syi'ah tentang nikah mut'ah.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam-macam materi yang terdapat dalam kepustakaan (buku). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis, yaitu pencarian berupa fakta, hasil dan ide pemikiran seseorang melalui cara mencari, menganalisis, membuat interpretasi serta melakukan generalisasi terhadap hasil penelitian yang dilakukan. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Metode ini dimaksudkan bahwa analisis bertolak dari data-data dan bermuara pada kesimpulan umum. Adapun teknik analisis datanya menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) yaitu, penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan dengan catatan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Landasan hukum pengharaman nikah mut'ah pada kalangan mazhab Sunni adalah bahwa surah an-Nisa ayat 24 yaitu ayat nikah mut'ah telah di nasakh oleh surah al-Mu'minun ayat 6-7 dan beberapa hadis tentang keharaman nikah mut'ah yang dijadikan rujukan oleh mazhab sunni adalah hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Shahih Bukhari dan Muslim dimana Nabi saw mengharamkan mut'ah pada waktu perang Khaibar serta hadis keharaman nikah mut'ah pada waktu penaklukan Mekah dan Tahun 'Autas hingga diharamkan sampai hari kiamat. Sedangkan landasan hukum kehalalan nikah mut'ah pada kalangan mazhab Syi'ah adalah dalil al-Quran surah an-Nisa ayat 23-24 dan mengutamakan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ahlulbait. Alasan penolakan ulama Sunni terhadap praktek nikah mut'ah yaitu menurut mereka nikah mut'ah merupakan perkawinan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam karena hanya mempermainkan perasaan wanita, menelantarkan anak dan dapat dijadikan sebagai sarana pelegalan pelacuran. Sedangkan ulama syi'ah beranggapan bahwa nikah mut'ah tidaklah seperti apa yang ulama sunni katakan. Pada dasarnya nikah mut'ah dan nikah da'im itu sama yang membedakan hanyalah batas waktu, keharusan memberi nafkah, saling mewarisi atau adanya kehamilan yang seluruhnya diatur menurut perjanjian mereka bersama sebelum melangsungkan pernikahan.

Agar perbincangan nikah mut'ah selalu aktual, diharapkan bagi pengkaji hukum Islam hendaknya dapat memaparkan secara netral, gamblang dan objektif pandangan-pandangan berbagai mazhab tanpa melibatkan rasa fanatisme. Bagi para cendekiawan muslim, diharapkan dapat berpikir lebih arif, bijaksana dan objektif dalam menyikapi problematika hukum Islam yang terjadi dalam masyarakat.



BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Perkawinan pada hakikatnya merupakan sebuah lembaga sakral yang diadakan oleh Pencipta Yang Maha Kuasa yang bertujuan untuk melestarikan keturunan umat manusia. Di dalam perkawinan itu sendiri, terkandung berbagai macam tujuan yakni; untuk melestarikan keturunan manusia, melatih tanggung jawab, memenuhi kebutuhan biologis, dan sebagai latihan memikul tanggung jawab. Dalam ketentuan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, telah diatur mengenai hal ikhwal yang berkaitan dengan lembaga perkawinan itu sendiri, mulai dari dasar perkawinan¹, syarat-syarat perkawinan², pencegahan perkawinan³, batalnya suatu perkawinan⁴, harta benda dalam perkawinan⁵, dan beragam hal lain yang kesemuanya terangkum dalam XIV Bab dan 67 pasal.

Hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang perkawinan seyogianya perlu diperhatikan demi tercapainya suatu kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Tentunya kehidupan seperti inilah yang menjadi dambaan setiap insan yang telah mengikatkan dirinya menjadi satu dalam suatu ikatan tali perkawinan.

¹Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1

²Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 6

³Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 13

⁴Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 22

⁵Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 35

Islam sebagai ajaran yang sesuai dengan fitrah, telah mensyari'atkan adanya pernikahan bagi setiap manusia. Namun, pernikahan dalam pandangan Islam bukan hanya sekedar formalisasi hubungan suami istri, pergantian status, serta upaya pemenuhan kebutuhan fitrah manusia. Pernikahan merupakan ibadah yang disyari'atkan oleh Allah SWT melalui Rasul-Nya, maka tidak diragukan lagi pernikahan adalah bukti ketundukan seseorang kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah yang maha Rahman memberikan tuntunan yang agung untuk melaksanakan ibadah ini, sebagaimana ibadah-ibadah lainnya (shalat, puasa, zakat, haji, dsb). Maka sebuah kecerobohan, bila hamba-Nya yang ingin melaksanakan ibadah yang suci ini (nikah) menodainya dengan bid'ah (yang tidak diajarkan oleh Islam) dan khurafat (hal-hal yang membawa kemusyrikan kepada Allah), sehingga mencabut status aktivitas itu dari ibadah menjadi mafsadat/dosa. Setiap muslim sudah semestinya untuk berusaha menyempurnakan ibadahnya semaksimal mungkin, tak terkecuali dengan sebuah proses kegiatan pernikahan. Kesemuanya itu dilakukan agar hikmah dan berkah ibadah dari ibadah itu dapat dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla.

Dalam pandangan agama khususnya pandangan dunia Islam terdapat pernikahan yang menjadi kontroversial, yakni masalah nikah mut'ah. Terdapat dua aliran besar di dalam dunia Islam yang memperdebatkan masalah nikah mut'ah, yakni sunni dan syiah⁶.

Secara historis, kemunculan dua aliran ini bermula dari permasalahan politik yaitu masalah kekhalifahan/khilafah yaitu puncak kepemimpinan (al-imamah al-kubra). Dinamakan dengan khalifah, karena yang memegang jabatan ini merupakan

⁶ Sunni (ahlu sunna) adalah orang-orang yang mengikuti sunnah dan berpegang teguh dengannya dalam seluruh perkara yang Rasulullah berada di atasnya dan juga para sahabatnya. Syiah menurut bahasa berasal dari kata dalam bahasa Arab yang artinya pengikut, pendukung, pencinta, golongan dan kelompok. Menurut istilah syiah adalah pengikut Imam Ali dan Ahli Al-Bait.

pemimpin tertinggi kaum muslimin dan pengganti Nabi dalam urusan kehidupan di dunia. Pertentangan ini bermula dari permasalahan politik, siapa pemegang tampuk pimpinan ummat sepeninggal Nabi, yang akhirnya berdampak pada permasalahan Teologi, saling kafir mengkafirkan dan saling klaim akan kebenaran, maka umat Islam tercerai belai.

Ahlu sunnah (wal Jama'ah) menjadi istilah khusus yang ditujukan kepada kelompok yang menjadi pengikut dan yang berpegang teguh kepada Sunnah dan menjadi mainstream (arus utama). Term ini juga digunakan untuk menunjukkan siapa saja yang mengikuti salah satu Imam Mazhab fiqh yang populer (seperti Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali).⁷

Sunnah juga ditunjukkan kepada kelompok yang menerima kepemimpinan Abu Bakar sebagai Khalifah/pemimpin agama dan pemimpin politik umat Islam setelah Nabi Muhammad meninggal dunia pada tahun 632 M. Pendapat lain diutarakan oleh Ira M. Lapidus dalam bukunya, bahwa umat Islam terpecah dalam memperbutkan kedudukan Khalifah. Muslim yang menerima suksesi Mu'awiyah dan serangkaian Khalifah sesudahnya disebut Sunni. Sedang mereka yang bersikeras bahwa Ali adalah satu-satunya Khalifah yang berhak dan bahwasanya hanya keturunannya yang berhak meneruskan dan menggantikannya disebut Syi'ah. Ada juga beberapa pakar yang menyatakan bahwa kelompok Ahlusunnah muncul sebagai reaksi atas paham Mu'tazilah, yang disebarkan oleh Washil bin Atha' (w.131H/748M), dan yang sangat mengandalkan akal dalam memahami dan menjelaskan ajaran-ajaran Islam.⁸

⁷ Asrar Mabru Faza, *Syi'ah dalam Kitab Sunni* (Medan: Perdana Publishing, 2015), h. 14.

⁸ Quraish Shihab, *Sunnah-Syiah, Bergandengan tangan, Mungkinkah? Kajian atas Konsep dan Pemikiran* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 58.

Quraish Shihab menyatakan bahwa benih syiah muncul sejak masa Nabi Muhammad SAW atau paling tidak secara politis benihnya muncul saat wafatnya Nabi (Pembaiatan Abu Bakar di Tsaqifah). Ketika itu keluarga Nabi dan sejumlah sahabat memandang bahwa Ali bin Abi Thalib lebih wajar dan lebih berhak menjadi Khalifah Nabi ketimbang Abu Bakar.⁹ Mereka berpendapat bahwa banyak hadis Nabi dengan jelas menegaskan bahwa Ali telah dilindungi dari kesalahan dan dosa, baik dalam tindakan maupun perkataan dan Ali paling mengetahui tentang Islam dan hukum-hukumnya.¹⁰

Syiah adalah mazhab politik yang pertama lahir dalam Islam, tampil pada akhir masa pemerintahan ustman, kemudian tumbuh dan berkembang pada masa Ali. Kalangan syi'ah sepakat bahwa Ali adalah Khalifah pilihan Nabi dan Ali adalah orang yang paling utama di antara para sahabat Nabi. Kalangan syi'ah tidak bersikap sama dalam menetapkan posisi Ali dan keturunannya, sebagian bersikap ekstrim dan sebagian lain bersikap moderat. Kelompok moderat terbatas hanya pada mengutamakan Ali atas semua sahabat, tidak mengkafirkan seseorang dan tidak mengkultuskan Ali hingga dipandang mengatasi semua manusia.¹¹

Dalam teologi Syiah, Syi'ah menegaskan bahwa kekhalifahan Islam dimana bimbingan esoteris dan kepemimpinan rohani merupakan unsur-unsur yang tak terpisahkan adalah milik Ali dan keturunannya. Mereka juga percaya bahwa menurut keturunan Nabi, imam alhul bait berjumlah 12 orang, dan berkeyakinan bahwa Al-Qur'an adalah sah berlaku dan dilaksanakan setiap orang dan mesti dipelajari melalui

⁹ Quraish Shihab, *Sunnah-Syiah, Bergandengan tangan, Mungkinkah? Kajian atas Konsep dan Pemikiran* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 65.

¹⁰ Allamah MH. Thabaththaba'i, *Shi'ite Islam* (terj) (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989), h.38.

¹¹ Muhammad Abu Zahra, *Aliran Politik dan Aqidah dalam Islam* (terj) (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2011), h. 34.

bimbingan ahlul bait.¹² Syi'ah percaya bahwa setelah Nabi wafat, kekhalifahan dan kekuasaan agama berada di tangan Ali. Kepercayaan ini berpangkal pada pandangan tentang kedudukan dan tempat Ali dalam hubungan dengan Nabi, hubungan dengan kalangan terpilih di antara para sahabat maupun hubungan dengan kaum muslimin umumnya.¹³

Syiah dengan konsep imamahnya, memberikan dampak yang signifikan bagi kelangsungannya dalam percaturan dan pertarungan ideologi khususnya dibidang politik, bahkan masuk dalam diskursus pemerintahan secara konstan dan adanya doktrin iman kepada imam sebagai dimensi esoteris dalam aqidah Syi'ah.¹⁴

Dalam teologi Sunni, doktrin utama Ahlu Sunnah atau Sunni adalah bahwa Al-Qur'an bukanlah makhluk (tidak diciptakan), yang berbeda dan menentang doktrin Mu'tazilah yang menyatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk (diciptakan). Kepercayaan dan ideologi sunni merujuk kepada ajaran masa awal Islam, guna mengikuti Nabi Muhammad saw, para sahabat dan para Tabi'in.¹⁵

Adapun akar konflik antara Sunni-Syi'ah adalah sama-sama saling memusuhi dan saling kafir-mengkafirkan. Sunni berpendapat bahwa Syi'ah adalah aliran yang sesat karena mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah dan menganggap bahwa Ali memiliki sifat ketuhanan sehingga dianggap sebagai Tuhan. Demikian juga sebaliknya, Syi'ah berpendapat bahwa Sunni adalah musuh yang sebenarnya musuh karena membenci Ahlul Bait dan Sunni tidak mengakui adanya konsep imamah yang dianut oleh Syi'ah.

¹² Allamah MH. Thabaththaba'i, *Shi'ite Islam* (terj) (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989), h.87.

¹³ Allamah MH. Thabaththaba'i, *Shi'ite Islam* (terj) (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989), h.40.

¹⁴ Zainal Abidin, *Imamah dan Implikasinya dalam Kehidupan Sosial* (Jakarta: Balitbang Kemenag RI, 2012), h.131

¹⁵ Joel L. Kraemer, *Renaissans Islam* (Bandung: Mizan, 2003), h.100

Sunni-Syiah merupakan dua kelompok mainstream dalam dua pemikiran dan gerakan Islam dari masa klasik hingga kontemporer. Meskipun sama-sama bersumber kepada Al-Qur'an dan Sunnah, dalam beberapa pandangan hukum, syi'ah berbeda dengan sunni. Sebagaimana terdapat perbedaan dikalangan sunni sendiri, maka wajarlah bila antara syi'ah sunni terdapat perbedaan.¹⁶

Kesukaran memahami arti ayat al-Qur'an, hidup yang selalu tumbuh dalam berbagai bentuk menurut tempat, masa dan cara berpikir manusia, juga berlainan pemahaman sunnah Nabi, menyebabkan lahirnya perbedaan paham itu. Perbedaan ini hanya terjadi pada masalah furu'.

Nikah mut'ah merupakan salah satu topik perdebatan besar yang menjadi perbedaan diantara syi'ah dan sunni pada bidang munakahat karena syi'ah imamah membolehkan nikah mut'ah, nikah yang terbatas waktunya, yang disetujui oleh calon suami istri. Semasa sahabat ini pernah diperbolehkan Nabi, Cuma mereka berselisih paham tentang ada atau tidak ada larangan sesudah itu.

Hakam bin Uyainah menerangkan, bahwa Ali bin Abi Thalib pernah berkata: “jikalau Umar tidak melarang nikah mut'ah, tidak ada orang yang berzina lagi kecuali orang yang sangat jahat”. Tatkala Abu Nasrah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang nikah mut'ah, Ibnu Abbas menerangkan bahwa nikah itu dibolehkan berdasarkan Quran Surat Annisa : 24

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ
ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ

¹⁶ M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h.246

أُجُورُهُنَّ فَرِيضَةٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Terjemahnya:

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki¹⁷ (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian¹⁸ (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu.¹⁹ Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.²⁰

Hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallah'anhu berkata:

كُنَّا نَقْرُؤُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ لَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا : أَلَا نَسْتَخْصِي؟
فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ لِكَ وَرَ خُصَّ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوبِ إِلَى أَجَلٍ.

Artinya:

“kami pernah berperang bersama Rasulullah saw sedangkan istri kami tidak turut serta bersama kami kemudian kami bertanya kepada Rasulullah, apakah boleh kami kebiri? Maka, Rasulullah saw melarang kami berbuat demikian dan memberikan rukhsah supaya kami kawin dengan perempuan dengan maskawin baju untuk satu waktu tertentu. (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari uraian latar belakang diatas dan melihat pentingnya pembahasan nikah mut'ah yang menjadi perdebatan diantara dua mazhab besar yang ada di dunia yaitu

¹⁷ Maksudnya: budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-samanya.

¹⁸ Ialah: selain dari macam-macam wanita yang tersebut dalam surat An Nisaa' ayat 23 dan 24.

¹⁹ Ialah: menambah, mengurangi atau tidak membayar sama sekali maskawin yang telah ditetapkan.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Toha Putra, 1996), h.65

Sunni dan Syi'ah. Maka penulis ingin mengkaji lebih dalam lagi bagaimana **“Nikah Mut'ah dalam Perspektif Sunni dan Syi'ah”**.

B. *Rumusan Masalah*

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan yaitu “Bagaimana Nikah Mut'ah dalam perspektif Sunni dan Syi'ah”, agar permasalahan yang dibahas lebih fokus, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan beberapa sub masalah sesuai dengan judul diatas, yaitu:

1. Bagaimana Landasan Hukum Nikah Mut'ah Perspektif Sunni dan Syi'ah?
2. Bagaimana Perbedaan Pemikiran Ulama Sunni dan Ulama Syi'ah tentang Nikah Mut'ah?

C. *Pengertian Judul*

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, dan untuk tidak menimbulkan kekeliruan dalam menginterpretasikannya, maka penulis memberikan batasan judul atau penegasan sebagai berikut :

1. Nikah mut'ah (kawin sementara) adalah sebuah kontrak antara seorang pria yang sudah menikah atau belum menikah dengan seorang wanita yang belum menikah atau janda dengan jangka waktu tertentu.²¹ Sedangkan nikah mut'ah menurut fikih syi'ah adalah ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan wanita, dengan mahar yang telah disepakati, yang disebut dalam akad, sampai pada batas waktu yang telah disepakati, atau dengan

²¹ Ratih Retnowati, *Resistensi Perempuan dalam Institusi Kawin Mut'ah*, RENAI Jurnal Politik Lokal & Sosial-Humaniora (Salatiga: Pustaka Percik, 2004), h. 56.

pemendekan batas waktu yang diberikan oleh laki-laki, maka berakhirilah ikatan pernikahan tersebut tanpa memerlukan proses perceraian.²²

2. Sunni atau Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Sunnah secara harfiah berarti tradisi, Ahl as-Sunnah berarti orang-orang yang secara konsisten mengikuti tradisi Nabi Muhammad saw, dalam hal ini adalah tradisi Nabi dalam tuntunan lisan maupun amalan beliau serta sahabat mulia beliau..
3. Syi'ah. Kata Syi'ah secara etimologi berarti *pengikut, pendukung, pembela, pencinta*, yang kesemuanya mengarah kepada makna dukungan kepada ide atau individu dan kelompok tertentu. Muhammad Jawad Maghniyah, seorang ulama beraliran Syi'ah, memberikan definisi tentang kelompok Syi'ah, bahwa mereka adalah “kelompok yang meyakini bahwa Nabi Muhammad saw telah menetapkan dengan *nash* (pernyataan yang pasti) tentang khalifah (pengganti) beliau dengan menunjuk Imam Ali kw.

D. Kajian Pustaka

Syifaun Nada dalam skripsinya yang berjudul “*nikah mut'ah dalam fiqh syi'ah (studi komparatif syi'ah imamiyah dan syi'ah ja'fariyah)*” Fakultas Syari'ah IAIN Purwakerto Jurusan Ilmu-ilmu Syari'ah 2016. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan pemikiran syi'ah imamiyah dan syi'ah ja'fariyah tentang nikah mut'ah.

Alvis Alfiana dalam skripsinya yang berjudul “*Nikah Mut'ah dalam Perspektif Hukum Islam*” Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2011. Dalam skripsi ini membahas tentang akibat hukum nikah mut'ah yang menggunakan metode penelitian normatif empiris.

²² Ja'far Murthada Al-Amili, *Nikah Mut'ah dalam islam Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Muhammad Jawad (Jakarta: as-Sajad, 1992), h. 17

Edi Sugianto dalam skripsinya yang berjudul “*Nikah mut’ah dalam Tafsir Al-Maragi dan Tafsir Al-Mizan*” Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Tafsir Hadis 2003. Dalam skripsi ini mengkaji tentang pandangan dan penafsiran Ahmad Mustafa al-Maragi dan Muhammad Husain Thabaththaba’i mengenai nikah mut’ah.

Skripsi diatas memiliki perbedaan dan persamaan dengan skripsi ini. Ketiga skripsi diatas sama-sama membahas tentang Nikah Mut’ah begitu juga dengan skripsi ini. Sedangkan perbedaannya yaitu skripsi ini membahas tentang nikah mut’ah dalam perspektif Sunni dan Syi’ah yaitu dengan menganalisis beberapa pemikiran ulama Sunni dan Syi’ah sedangkan skripsi pertama membahas nikah mut’ah dalam fiqh syi’ah (studi komparatif syi’ah imamiyah dan syi’ah ja’fariyah). Sedangkan skripsi kedua nikah mut’ah dalam perspektif Hukum Islam. Dan skripsi terakhir membahas nikah mut’ah dalam tafsir al-Maragi dan tafsir al-Mizan.

E. *Metodologi Penelitian*

Metode penelitian adalah satu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah dapat mencapai hasil yang optimal.²³ Atau diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu.²⁴

²³ Anton Baker, *Metode-Metode Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisus, 1986), h.55

²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), h.3

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam-macam materi yang terdapat dalam kepustakaan (buku).²⁵

Adapun sifat penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan deskriptif analisis, yaitu pencarian berupa fakta, hasil dan ide pemikiran seseorang melalui cara mencari, menganalisis, membuat interpretasi serta melakukan generalisasi terhadap hasil penelitian yang dilakukan.

Data yang diteliti berupa naskah-naskah yang bersumber dari khazanah kepustakaa. Produser dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan data deskriptif yang berupa data tertulis setelah dilakukan analisis pemikiran (*concrete analyze*) dari suatu teks.²⁶

2. Sumber Data

Karena penelitian ini merupakan studi terhadap karya dari dua orang tokoh yang ingin dikomparatitkan maka data-data yang digunakan lebih merupakan data pustaka.

Ada dua macam data yang digunakan yaitu data sekunder dan data primer.

a. Data Primer

Data primer adalah rujukan pokok yang digunakan dalam penelitian atau sumber utama yang secara langsung berkaitan dengan tema yang menjadi pokok pembahasan.²⁷

²⁵ Suharismi Arikuknto, *Manejemen Penenlitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), h.310

²⁶ Steven Adam J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), h.3

²⁷ Kartini Kartono, *Pengantar metodologi Research* (Bandung: Tarsiti, 2000), h.78

Adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini adalah: Tafsir al-Mizan karya Allamah Thaba'thaba'i, Tafsir Ibnu Katsir, Halal dan Haram dalam Islam karya Imam al-Qardhawi, Nikah Mut'ah dalam Islam, Dunia Wanita dalam Islam.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah kesaksian atau data yang berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli. Sumber data sekunder bertujuan untuk melengkapi data primer. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: al-Qur'an, kitab-kitab fiqh, buku-buku, dan karya-karya lain yang berkaitan erat dengan pembahasan dan dapat membantu penyempurnaan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa atau hal-hal atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen yang mendukung penelitian.²⁸

Metode pengumpulan data dengan cara dokumentasi dilakukan karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Sumber-sumber data baik yang primer maupun sekunder dikumpulkan sebagai pedoman tersebut dibaca dan dipahami untuk menemukan data-data yang diperlukan untuk menjawab masalah-masalah pada penelitian ini.²⁹

²⁸ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta), h.83.

²⁹ Suharismi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), h.236.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu rangkaian kegiatan penelitian yang sangat penting dan menentukan. Menurut Patton, analisis data yaitu suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.³⁰

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Metode ini dimaksudkan bahwa analisis bertolak dari data-data dan bermuara pada kesimpulan umum. Adapun teknik analisis datanya menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) yaitu, penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan dengan catatan. Adapun langkah-langkah analisis data yaitu sebagai berikut:

- 1) Memilih dan menetapkan pokok bahasan yang akan dikaji
- 2) Mengumpulkan data-data yang sesuai dengan pokok bahasan melalui buku-buku maupun sumber lainnya
- 3) Menganalisis dan mengklarifikasi.³¹

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan pokok dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana nikah mut'ah dalam perspektif Sunni dan Syi'ah, adapun tujuan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana landasan hukum nikah mut'ah perspektif Sunni dan Syi'ah.

³⁰ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner* (Yogyakarta: Pradigma, 2012), h.130.

³¹ Suharismi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), h.309.

2. Untuk mengetahui bagaimana perbedaan pemikiran ulama sunni dan syi'ah tentang nikah mut'ah.

Sedangkan terkait kegunaannya, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat sebagai:

1. Media pengetahuan atau sebagai wadah yang dapat digunakan untuk menambah wawasan baru bagi mahasiswa / mahasiswi yang ingin mengkaji atau mendalami nikah mut'ah.
2. Dari hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta pertimbangan dalam mengkaji masalah nikah mut'ah dalam perspektif Sunni dan Syi'ah.



BAB II

LANDASAN HUKUM NIKAH MUT'AH

A. Asal-Usul Nikah Mut'ah

1. Pengertian Nikah Mut'ah

Nikah mut'ah adalah kata majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu nikah dan mut'ah. Nikah secara bahasa adalah akad dan watha'. Dalam istilah ini nikah diartikan akad. Kata nikah ini kemudian disandingkan dengan kata mut'ah.

Secara defenitif nikah menurut Muhammad Abu Zahra yaitu akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang wanita, saling tolong menolong antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.

Dapat dipahami bahwa pernikahan merupakan sarana yang efektif untuk memelihara manusia dari perbuatan zina, karena secara sederhana pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera serta untuk mengembangkan keturunan.

Mut'ah berasal dari kata *mata'a yamta'u mat'an* secara literal mempunyai ragam pengertian, antara lain manfaat, bersenang-senang, menikmati, bekal.¹ Terdapat beberapa pengertian tentang mut'ah yaitu: pertama, mut'ah adalah uang, barang, dan sebagainya yang diberikan suami kepada istri yang diceraikannya sebagai bekal hidup (penghibur hati) bekas istrinya.² Kedua, kesenangan mutlak

¹ DEPDIBUD, *kamus besar bahasa indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h.677

² Fuad Mohd. Fahrudin, *kawin mut'ah dalam pandangan Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), h.70

yang dijadikan dasar hidup bagi laki-laki untuk mencapai keinginannya, hawa nafsunya dan birahinya dari wanita tanpa syarat. Ini dilakukan dengan perkawinan sementara atau yang diistilahkan dengan “kawin kontrak” dalam jangka waktu yang dibatasi menurut perjanjian.³

Secara defenitif, nikah mut'ah berarti pernikahan dengan menetapkan batas waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara calon suami dan istri. Bila habis masa (waktu) yang ditentukan, maka keduanya dapat memperpanjang atau mengakhiri pernikahan tersebut sesuai kesepakatan semula. Penentuan jangka waktu inilah yang menjadi ciri khas nikah mut'ah, sekaligus pembeda dari nikah biasa.

2. Perbedaan Nikah Mut'ah dengan Nikah Dha'im

Pada nikah sementara kedua belah pihak (suami-istri) dapat menentukan jangka waktu yang mereka kehendaki. Keduanya juga dapat memperpanjang jangka waktu dengan mengulangi akad baru, atau berpisah setelah habisnya waktu yang mereka tentukan bersama. Berbeda dengan nikah permanen (da'im), yang memegang penentuan waktu hanyalah pihak lelaki dan kaum wanita tidak dapat mencampurinya.⁴

Dalam nikah permanen (Da'im) kaum lelaki selalu wajib menanggung nafkah istrinya dan memberinya segala sesuatu yang diperlukan, baik tempat tinggal, obat-obatan, makanan dan lain-lain. Tetapi dalam nikah sementara semua itu ditentukan

³ Quraish shihab, *perempuan: dari cinta sampai seks dari nikah mut'ah sampai nikah biasa dari bias lama sampai bias baru* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h.189

⁴ Ja'far Murthado al-'Amili, *Nikah Mut'ah dalam Islam kajian Ilmiah dari Berbagai Mazhab*, terj. Hidayatullah Husain Al-Habsyi (Cet. II; Surakarta: Yayasan Abna' Al Husain, 2002), h.11

menurut perjanjian yang mereka sepakati saat mereka melakukan akad perkawinan. Terkadang pihak lelaki tidak mampu menanggung semua itu, dan terkadang pihak wanita memang tidak mengharapkan semua itu.⁵

Dalam nikah da'im wanita tidak menolak ajakan atau harapan kehamilan yang dikehendaki oleh suami, sedang dalam nikah sementara harus menurut perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Untuk dapat saling mewarisi dalam perkawinan mut'ah karena meninggalnya salah satu pihak disaat tali perkawinan masih berlangsung dapat diatur menurut perjanjian.⁶

Disamping itu, ketika Islam memilih nikah mut'ah sebagai jalan keluar yang paling tepat, Islam juga membekali pemuda-pemuda dengan memberikan kekuatan jiwa baik secara akidah ataupun kemanusiaan. Islam juga melepaskan mereka dari ketergantungan hidup duniawi dan menganggapnya sebagai sarana, bukan tujuan, serta sebagai tempat singgah, dan bukan tempat tujuan akhir.⁷

Islam memberikan pengertian bahwa setelah kehidupan dunia mereka akan dihisab dengan mendapatkan salah satu dari dua pilihan, pahala atau siksa yang sangat pedih. Islam juga membekali mereka dengan nasihat-nasihat takwa kepada

⁵ Ja'far Murthado al-'Amili, *Nikah Mut'ah dalam Islam kajian Ilmiah dari Berbagai Mazhab*, terj. Hidayatullah Husain Al-Habsyi (Cet. II; Surakarta: Yayasan Abna' Al Husain, 2002), h.11

⁶ Murtadha Muthahhari, *Huquq Zan Dar Islam*, Al-Sayyid Muhammad Taqi Al-Hakim, Al-Zawaj Al-Muwaqqat.

⁷ Ja'far Murthado al-'Amili, *Nikah Mut'ah dalam Islam kajian Ilmiah dari Berbagai Mazhab*, terj. Hidayatullah Husain Al-Habsyi (Cet. II; Surakarta: Yayasan Abna' Al Husain, 2002), h.11

Allah, percaya kepada-Nya, selalu berserah diri (tawakkal) pada-Nya, merasa takut, dan selalu mengharap dari-Nya.

Itulah bekal yang mampu menjadikan mereka untuk dapat menghadapi tantangan hidup yang menyesatkan, dan dapat mengendalikan gejolak seksualnya dengan melaksanakan sesuatu yang dibenarkan oleh syariat dan jalan yang dianggap lebih tepat oleh akal.⁸

Telah disebutkan bahwa seluruh persyaratan yang terdapat dalam nikah permanen juga berlaku dalam nikah mut'ah, kecuali beberapa hal seperti adanya batas waktu, keharusan memberi nafkah, saling mewarisi atau adanya kehamilan yang seluruhnya diatur menurut perjanjian mereka bersama sebelum melangsungkan pernikahan.⁹

3. Asal-usul Nikah Mut'ah

Nikah mut'ah merupakan suatu bentuk perkawinan terlarang yang dijalin dalam tempo yang singkat untuk mendapatkan perolehan yang ditetapkan. Ia diperkenankan pada masa awal pembentukan ajaran Islam, sebelum syariat Islam ditetapkan secara lengkap. Ia diperbolehkan pada hari-hari permulaan sewaktu

⁸ Selain puasa, karena tidak semuanya mampu menahannya dengan berpuasa, kemudian apakah dia harus melakukan puasa dari sejak usia pubertas sampai dimana dia mampu untuk melakukan nikah permanen (da'im)?, kalau memang hanya puasa saja yang dijadikan sebagai jalan keluarnya, maka apa arti perintah Rasul saw untuk nikah, dan mengeluarkan orang dari golongannya, bagi yang tidak menyukainya? Pemahaman semacam itu adalah pemahaman yang salah, mungkin cara itu dapat dibenarkan tetapi untuk yang sifatnya hanya sesaat.

⁹ Ja'far Murthado al-'Amili, Nikah Mut'ah dalam Islam kajian Ilmiah dari Berbagai Mazhab, terj. Hidayatullah Husain Al-Habsyi (Cet. II; Surakarta: Yayasan Abna' Al Husain, 2002), h. 15

seseorang melakukan suatu perjalanan atau ketika orang-orang sedang bertempur melawan musuh.¹⁰

Nikah mut'ah sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat Arab di zaman Jahiliah untuk memperistrikan seorang wanita buat waktu yang singkat, untuk sementara waktu saja. Sangat hinalah tindakan terhadap wanita, diperbuat oleh kaum pria untuk menjadi alatnya diwaktu yang singkat saja. Seorang pedagang umpamanya, atau seorang petugas berpindah dari satu kota ke kota yang lain. Pada setiap kota yang disinggahinya, dinikahnya seorang wanita, nanti setelah selesai urusannya dikota itu, wanita itu diceraikannya dan ia pergi ke kota berikutnya, mengawini perempuan dikota pula, yang nanti sesudah pekerjaannya selesai akan ditalaknya pula. Begitulah seterusnya. Pada mulanya Islam membiarkan ini, tapi belakangan keluarlah larangan melakukannya.

Nikah mut'ah pernah diperbolehkan oleh Rasulullah sebelum stabilitasnya syari'at Islam, yaitu diperbolehkannya pada waktu bepergian dan peperangan. Akan tetapi kemudian diharamkan. Rahasia diperbolehkan nikah mut'ah waktu itu adalah karena masyarakat Islam pada waktu itu masih dalam transisi (masa peralihan dari Jahiliyah kepada Islam). Sedang perzinaan pada masa jahiliyah suatu hal yang biasa. Maka setelah Islam datang dan menyeru pada pengikutnya untuk pergi berperang. Karena jauhnya mereka dari istri mereka adalah suatu penderitaan yang berat. Sebagian mereka ada yang kuat imannya dan ada pula yang sebagian tidak kuat imannya. Bagi yang lemah imannya akan mudah berbuat zina yang merupakan

¹⁰ Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h.62

sebagai perbuatan yang keji dan terlarang. Dan bagi yang kuat imannya berkeinginan untuk mengkebiri dan mengipoternkan kemaluannya.¹¹

Alasan mengapa mut'ah diperkenankan adalah bahwa orang-orang yang baru memeluk agama Islam tengah mulai masa peralihan dari Jahiliyah kepada Islam. Pada masa Jahiliyah, perzinaan merupakan hal yang sangat wajar sehingga ia tidak dianggap sebagai dosa. Lalu turunlah larangan Islam tentang bunga bank (al-Riba) dan minuman keras (al-Khamr) secara bertahap, karena masyarakat telah sangat akrab dengan hal-hal tersebut, sedangkan mut'ah hanya diperkenankan pada masa-masa awal karena orang-orang berjuang dimedan tempur. Mereka yang imannya masih lemah mencoba melakukan zina semasa perang itu. Sedangkan orang yang kuat imannya menahan keinginannya dengan keras untuk mengendalikan hawa nafsunya.¹²

Disamping itu juga pada permulaan Islam jumlah umat Islam sangat sedikit dan mereka harus terus menerus melawan musuh-musuh Islam. Keadaan ini menjadikan mereka tidak mampu untuk melaksanakan beban atau kewajiban perkawinan dan membangun keluarga. Berkaitan dengan keadaan material mereka, yang sangat miskin, maka tidak rasional kalau mereka dituntut membangun keluarga sebagai prioritas utama. Disamping itu adat mereka (masa Jahiliyah) pra Islam, mereka biasa menyalurkan hasrat seksualnya kepada beberapa perempuan. Nikah mut'ah waktu itu diperbolehkan sebagai pintu darurat atas desakan kebutuhan hasrat seksual, khususnya untuk konteks para pejuang muslim yang tabit seksualnya tidak terbandung dan keadaan ekonomi mereka sangat kurang. Maka dalam keadaan

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), h.261

¹² Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h.62

seperti ini wajib disyariatkan sebuah hukum yang berlaku sementara, untuk menghilangkan zina dan dapat memberikan jalan keluar atas problem seksual yang dialami mereka. Syariat itu adalah nikah mut'ah atau nikah muaqqat.

Pemberlakuan hukum itu seperti hukum adat, yang terbatas karena ada kondisi darurat peperangan, yakni bahwa bala tentara itu terdiri dari pemuda-pemuda yang tidak memiliki istri dan tidak mampu membendung hasrat seksual. Puasa untuk mengurangi hasrat seksual tentu bukan solusi yang tepat, karena pada saat itu mereka sedang berperang, yang tentu saja membutuhkan kondisi tubuh yang kuat. Puasa sendiri tentu akan mempengaruhi ketahanan tubuh mereka. Hal itu sesuai dengan anjuran Nabi saw. bahwa dalam peperangan dilarang untuk melemahkan diri dari berbagai aspek dan keadaan.¹³

Keadaan diataslah yang menjadi dasar pensyariatan nikah mut'ah. Seperti yang dikatakan oleh Ibn Mas'ud:

عن بن مسعود قال : كنا نغزو مع رسول الله صام وليس معنا نساء فقلنا : ألا نستخصي؟ فنهانا رسول الله صام عن ذلك. ورخص لنا ان ننكح المرأة الثوب إلى أجل.

Artinya:

Dari Ibn Mas'ud berkata: waktu itu kami sedang perang bersama Rasulullah saw dan tidak bersama kami wanita, maka kami berkata: bolehkah kami mengkebiri (kemaluan kami). Maka Rasulullah saw melarang kami melakukan itu. Dan Rasulullah memberikan kami keringanan kepada kami untuk menikahi perempuan dengan mahar baju sampai satu waktu.

¹³ Abd al-Rahman al-jaza'iri, *Kitab al-Fiqh*, h.90-91

Pada hadis diatas jelas sekali bahwa Rasulullah telah mengizinkan para sahabatnya untuk melakukan nikah mut'ah. Tetapi kebolehan itu perlu dilihat konteksnya. Dalam Sahih al-Bukhari diriwayatkan tentang alasan dibolehkannya nikah mut'ah:

عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرَخَّصَ فَقَالَ لَهُ مَوْلَى لَهُ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَالِ الشَّدِيدِ وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ أَوْ نُحُوهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ

Artinya:

Dari Abi Jamrah berkata: saya mendengar Ibn 'Abbas ditanya tentang bersenang-senang terhadap perempuan. Maka Ibn 'Abbas memberikan rukshah (keringanan). Maka budaknya berkata kepadanya: Sungguh hal itu (mut'ah al-nisa') itu dalam keadaan yang sangat sulit (terpepet) dan dalam keadaan sedikitnya jumlah perempuan atau hal-hal yang seperti itu. Maka Ibn 'Abbas berkata: Ya.¹⁴

B. Landasan Hukum Nikah Mut'ah Menurut Ulama Sunni

Sunnah secara harfiah berarti tradisi, Ahl as-Sunnah berarti orang-orang yang secara konsisten mengikuti tradisi Nabi Muhammad saw, dalam hal ini adalah tradisi Nabi dalam tuntunan lisan maupun amalan beliau serta sahabat mulia beliau.¹⁵

Sunni adalah kelompok umat Islam yang berhaluan fikihnya merujuk kepada empat imam mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali disebut sunni sangat

¹⁴ Muhammad b Isma'il al-Bukhari, *sahih al-Bukhari* (Riyad: Dar-‘Alam al-Kutub, 1996), 3724

¹⁵ Quraish Shihab, *Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan!Mungkinkah? Kajian atas Konsep dan Pemikiran* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h.57

identik dengan fihiyah sedangkan Ahlu as-Sunnah berkonotasi kepada aliran teologi yaitu ‘Asy’ariyah dan Maturidiyah.¹⁶

Pengarang *al-Farqu bain al-Firq*, yang beraliran Sunni, menerangkan bahwa ada delapan macam golongan Ahlusunnah, dan bahwa ada lima belas prinsip pokok yang harus dipenuhi sehingga seseorang dapat dinamai Ahlusunnah. Prinsip-prinsip tersebut masih memiliki rincian-rincian yang mungkin mereka perselisihkan, namun mereka tidak saling menyatakan kesesatan atau kefasikan pihak lain.¹⁷

Adapun yang termasuk golongan mazhab Sunni atau macam-macam mazhab Sunni yaitu:

1. Mazhab Hanafi
2. Mazhab Maliki
3. Mazhab Syafi’i
4. Mazhab Hambali

Mazhab sunni dalam hal nikah mut’ah tidak ditemukan di dalam kitab-kitab fikih mereka membahas tentang hal ini, sehingga seperti telah menjadi ketetapan jumhur ulama mereka bahwa nikah mut’ah tersebut telah dihapus untuk selamanya.

¹⁶ H. Busyairi Ali, *Nikah Mut’ah Halal atau haram?* (Cet I; Banjarmasin: Ar-Risalah Islamic Centre Foundation, 2012), h.49

¹⁷ Quraish Shihab, *Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan!Mungkinkah? Kajian atas Konsep dan Pemikiran* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 58

Sebenarnya mazhab-mazhab fikih dalam Islam sepakat bahwa nikah mut'ah adalah pernikahan yang halal pada awal Islam. Rasulullah saw menghalalkannya dengan wahyu dari Allah Swt dalam waktu tertentu. Mereka hanya berselisih pendapat dalam hal kelanjutan kehalalannya. Syi'ah Imamiah (mazhab Ja'fariyah) berpendapat bahwa kehalalan nikah mut'ah itu tetap berlaku dan tidak ada hadis yang menghapusnya. Pendapat ini berbeda dengan pendapat mazhab-mazhab yang empat (mazhab Sunni) yang mengharamkannya karena ketentuan tersebut sudah dihapus.¹⁸

Mayoritas ulama Sunni memahami kalimat *فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ* dalam ayat 24 surah An-Nisa tersebut pengertiannya menikmati hubungan pernikahan yang dijalani secara normal (nikah permanen) dan karena penekanannya pada kenikmatan dan kelezatan hubungan jasmani, maskawin dinamai *أجر* (Ajr), yang secara harfiah adalah upah atau imbalan.¹⁹

Sementara ulama tafsir dari kelompok Sunni menyatakan bahwa Allah Swt hanya membenarkan dua cara untuk penyaluran seksual, sebagaimana ditegaskan-Nya ketika menguraikan sifat-sifat orang-orang mukmin, yakni firman-Nya:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْرُوجِهِمْ حَفِظُونَ (ه). إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ
مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعُدُونَ. (٧)

¹⁸ Ja'far Subhani, *Yang Hangat dan Kontroversial dalam Fikih*, alih bahasa Irwan Kurniawan, (Jakarta: Lentera, (Cet. I; Jakarta: Lentera, 1999), h.100

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta sampai seks dari nikah mut'ah sampai nikah Sunnah* (Cet. I; Jakarta: Lentera, 2005) h.190

Terjemahan:

“Dan mereka menyangkut kemaluan mereka adalah pemelihara-pemelihara kecuali terhadap pasangan-pasangan mereka atau budak perempuan yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidaklah tercela. Barangsiapa mencari dibalik itu, mereka itulah pelampau-pelampau batas.”²⁰

Ayat diatas hanya menyebut dua cara penyaluran seksual, yaitu melalui pasangan-pasangan yang dinikahi tanpa batas waktu (nikah daim) dan melalui kepemilikan budak perempuan. Dengan demikian, tidak ada cara melalui nikah mut’ah karena perempuan yang dinikahi secara mut’ah tidak dapat dinamai istri, bukan juga termasuk budak perempuan yang dimiliki.²¹

Kalangan Sunni diantaranya adalah Imam asy-Syafi’I sangatlah gigih mempertahankan argumennya bahwa nikah mut’ah adalah haram sampai hari kiamat. Karena baeliau mengatakan Amr bin al-Hutsaim telah menggambarkan kepada kami dari bapaknya, dari Ibnu Mas’ud tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang wanita, kemudian dia menikahinya. Ia berkata, “keduanya tetap dianggap berzina”. Sementara kami maupun mereka tidak berpendapat seperti ini. Bahkan kami katakana bahwa keduanya memang berdosa ketika berzina, namun melakukan hubungan yang halal setelah menikah tidak dianggap berzina. Umar dan Ibnu Abbas telah mengatakan pendapat yang serupa dengan ini.²²

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an al-Karim dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Toha Putra, 1996), h.

²¹ M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta sampai seks dari nikah mut’ah sampai nikah Sunnah* (Cet. I; Jakarta: Lentera, 2005) h.190

²² H. Busyairi Ali, *Nikah Mut’ah Halal atau haram?*, (Cet I; Banjarmasin: Ar-Risalah Islamic Centre Foundation, 2012), h.28

Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim bin al-Munjir An-Naisaburi asy-Syafi'i mengatakan: keharaman mut'ah sudah nyata karena Rasulullah melarangnya. Ibnu Mas'ud dalam satu riwayat juga dari Ali pernah berkata: ayat-ayat thalaq, iddah dan waris telah menasakh ayat mut'ah. Bahkan Ibnu Umar juga pernah berkata: tidak ada yang melakukan nikah mut'ah kecuali seorang pezina. Ibnu Jubair mengatakan: Mut'ah adalah zina yang nyata dan tidak ada seorang pun yang ku ketahui melakukannya kecuali akan kurajam. Demikian juga Hasan Basri mengatakan: Mut'ah adalah nikah tiga hari yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan diantara ahli ilmu Mutakhirin yang mengharamkannya adalah: Malik, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Ishaq, Abu Tsur dan Ashab ar-Ra'yu dan tidak ada yang menghalalkannya kecuali golongan Rafidhah. Syafi'i mengatakan jika nikah (campur) itu terjadi maka tidak ada mahar bagi wanita itu dan jika telah terjadi maka baginya mahar mitsil dan wajib bagi wanita itu beriddah dan Abu Tsur menambahkan jika ia tahu larangan Mut'ah itu maka sesuai dengan kata Syafi'i dan jika ia tahu maka pemimpin (penguasa) harus menghukumnya.²³

Mayoritas kaum Sunni berpendapat memang benar perkawinan mut'ah semula diperbolehkan dalam Islam, tetapi kemudian diharamkan karena perintah khalifah 'Umar bin al-Khattab. Akan tetapi, dalam sumber-sumber yang dipakai oleh kaum Sunni terdapat banyak riwayat yang menyebut bahwa pernikahan ini pernah dilarang di zaman Nabi. Ada yang menyatakan bahwa larangan itu terjadi pada perang

²³ Muhammad Faisal Hamdani, *Nikah Mut'ah Analisis Perbandingan Hukum Antara Sunni dan Syi'ah* (Jakarta: Gaya Media Pratama 2008), h. 68

Khaibar, ada yang mengatakan pada pembukaan Makkah, perang hunian (Autas), dan ada yang mengatakan pada haji perpisahan Nabi. Ada juga bahkan, yang menyebutkan bahwa pembolehan dan pelarangan itu terjadi sampai tujuh kali dan berakhir dengan pelarangan.²⁴

Ulama ahli tafsir beraliran Sunni ar-Razi dalam mengharamkan Mut'ah berhujjah dengan ucapan Khalifah Umar ra, yang ia sampaikan diatas mimbar, sekitar firman Allah Swt: *فَمَا اسْتَمَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوا جُورَهُنَّ فَرِيضَةً*, ar-Razi mengatakan hukum keharaman nikah mut'ah didasari dari fatwa khalifah Umar ra, yang melarang nikah mut'ah dan yang melakukannya akan dihukum.²⁵

Banyak dalil-dalil yang digunakan oleh mazhab sunni mengenai keharaman nikah mut'ah yaitu: pertama, disebutkan dalam al-Quran surah an-Nisa ayat 24 dijadikan dalil kehalalan nikah mut'ah telah dihapus, seperti halnya pendapat Imam Syafi'i beserta pengikutnya yang mengatakan bahwa nikah mut'ah semula diperbolehkan kembali dan dihapuskan sampai dua kali.²⁶ Kedua, hadis yang lebih populer tentang nikah mut'ah yang dijadikan rujukan oleh mazhab sunni yaitu hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Shahih Bukhari dan Muslim dimana Nabi saw

²⁴ Machasin, *Nikah Mut'ah: Kajian atas Argumentasi Syi'ah, Musawa, Jurnal Studi Gender* (Pusat Studi Wanita: IAIN Sunan Kalijaga, Vol 1 No.2, 2002), h. 139

²⁵ Imam Fakhrrurazi, *al-Tafsir al-Kabir* (Beirut: Dar Ihya al-Taratsi al-Arabiy, Jilid 4, 2001M), h. 44

²⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim* (Beirut: Maktabah an-Nur al-Ilmiyah, 1991), h. 449

mengharamkan nikah mut'ah pada waktu perang Khaibar dan hadis pada waktu penaklukan Mekah dan Tahun 'Autas hingga diharamkan sampai hari kiamat.²⁷

C. Landasan Hukum Nikah Mut'ah Menurut Ulama Syi'ah

Kata Syi'ah secara etimologi berarti *pengikut, pendukung, pembela, pencinta*, yang kesemuanya mengarah kepada makna dukungan kepada ide atau individu dan kelompok tertentu.²⁸

Muhammad Jawad Maghniyah, seorang ulama beraliran Syi'ah, memberikan definisi tentang kelompok Syi'ah, bahwa mereka adalah “kelompok yang meyakini bahwa Nabi Muhammad saw telah menetapkan dengan *nash* (pernyataan yang pasti) tentang khalifah (pengganti) beliau dengan menunjuk Imam Ali kw. Definisi ini sejalan dengan defini yang dikemukakan oleh Ali Muhammad al-Jurjani (1339-1413 M), seorang sunni penganut aliran Asy'ariyah, yang menulis dalam bukunya *At-Ta'rifat* (Definisi-definisi) bahwa: “*Syi'ah adalah mereka yang mengikuti Sayyidina Ali ra dan percaya bahwa beliau adalah Imam sesudah Rasul saw dan percaya bahwa imamah tidak keluar dari beliau dan keturunannya*”. Definisi ini kendati hanya mencerminkan sebagian dari golongan Syi'ah bukan seluruhnya namun untuk

²⁷ H. Busyairi Ali, *Nikah Mut'ah Halal atau haram?*, (Cet I; Banjarmasin: Ar-Risalah Islamic Centre Foundation, 2012), h.156

²⁸ Quraish Shihab, *Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan!Mungkinkah? Kajian atas Konsep dan Pemikiran* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h.60

sementara dapat diterima karena kandungannya telah menunjuk kepada syi'ah yang terbanya dewasa ini, yakni syi'ah Itsna 'Asyariyah.²⁹

Berikut penulis kemukakan gambaran sekilas menyangkut kelompok-kelompok syi'ah yaitu:

1. Syi'ah Ghulat

Syi'ah kelompok (ekstremis) ini hampir dapat dikatakan telah punah. Mereka antara lain: As-Sabaiyah, Al-Khatthabiyah, Al-Ghurabiyah, Al-Qaramithah, Keyakinan mereka sangat sesat dan ekstrem. Mereka, antara lain menyatakan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib ra adalah Tuhan, bahwa setiap teks mempunyai makna lahir dan makna batin, dan yang penting adalah makna batinnya. Mereka menganjurkan kebebasan seks dan kepemilikan wanita dan harta secara bersama, dengan dalih mempererat hubungan kasih sayang. Mereka juga membatalkan kewajiban shalat dan puasa. Ini antara lain yang menjadikan kelompok induk mereka, yakni Syi'ah Ismailiyah pun mengutuk mereka.³⁰

Masih banyak lagi cabang-cabang dari kelompok ekstrem ini, seperti **al-Manshuriyah**, **an-Nushaiziyah**, **al-Kayyaliyah**, **al-Kaisaniyah**, dan masih banyak lainnya yang dapat mencapai puluhan dengan aneka cabang dan pecahan-pecahannya dan yang disimpulkan oleh asy-Syahrastany sebagai “kelompok-kelompok yang

²⁹ Quraish Shihab, *Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan!Mungkinkah? Kajian atas Konsep dan Pemikiran* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h.61

³⁰ Quraish Shihab, *Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan!Mungkinkah? Kajian atas Konsep dan Pemikiran* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h.72

melampaui batas dalam keyakinan mereka tentang imam-imam mereka sehingga menjadikan imam-imam itu keluar dari batas-batas kemakhlukan/kemanusiaan. Mereka mempersamakan imam-imam itu dengan Tuhan, sebaliknya ada juga diantara mereka yang mempersamakan Tuhan dengan makhluk”.³¹

Jika kelompok Syi’ah yang sesat dan menyesatkan ini belum punah sama sekali, maka kemungkinan besar pengikutnya amat sedikit dan tidak lagi memiliki peranan atau pengaruh yang besar.

2. Syi’ah Ismailiyah

Kelompok Syi’ah Ismailiyah hingga kini masih memiliki pengikut-pengikut setia, namun sebagian dari kelompok-kelompoknya memiliki pandangan-pandangan yang dapat dinilai menyimpang. Kini, Syi’ah Ismailiyah tersebar dalam kelompok minoritas di sekian banyak negara, antara lain Afghanistan, India, Pakistan, Suriah, dan Yaman, serta beberapa negara Barat, seperti di Inggris dan Amerika Utara.³²

Kelompok Syi’ah Ismailiyah meyakini bahwa Ismail, putra Imam Ja’far ash-Shadiq adalah imam yang menggantikan ayahnya (Ja’far ash-Shadiq) yang merupakan imam keenam dari aliran Syi’ah secara umum. Memang setelah meninggalnya Imam Ja’far, sekelompok penganut Syi’ah percaya bahwa putra beliau, Musa al-Khadzim adalah imam ketujuh, sebagaimana kepercayaan Syi’ah Itsna

³¹ Quraish Shihab, *Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan!Mungkinkah? Kajian atas Konsep dan Pemikiran* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h.73

³² Quraish Shihab, *Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan!Mungkinkah? Kajian atas Konsep dan Pemikiran* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h.73

‘Asyariyah. Sedang kelompok lainnya mempercayai bahwa Ismail, kemudian putranya, Muhammad, adalah Imam sesudah ayah mereka, padahal Ismail wafat lima tahun sebelum wafatnya sang ayah (Imam Ja’far).³³

Ismail bin Ja’far ash-Shadiq menurut kelompok ini sebenarnya belum wafat, kelak dia akan tampil kembali di pentas bumi ini. Kedatangannya dinantikan oleh kelompok Ismailiyah, sebagaimana kelompok Syi’ah Itsna ‘Asyariyah dan sebagian kelompok Ahlusunnah menantikan kehadiran Imam Mahdi.

Syi’ah Ismailiyah dinamai juga *Syi’ah Sab’iah* (Syi’ah tujuh), karena mereka hanya mempercayai tujuh orang imam sejak Sayyidina Ali ra dan berakhir pada MuhAmmad, putra Ismail (putra Ja’far ash-Shadiq). Mereka juga digelari dengan *al-Bathiniyah*, karena mereka percaya bahwa al-Qur’an dan Sunnah mempunyai makna lahir dan makna batin (tersembunyi). Makna lahir adalah kulit, sedang makna batin adalah inti.³⁴

3. Az-Zaidiyah

Az-Zaidiyah adalah kelompok Syi’ah pengikut Zaid bin Muhammad bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib ra. Beliau lahir pada 80 H dan terbunuh pada 122 H. Beliau dikenal sebagai seorang yang sangat taat beribadah, bepengetahuan luas sekaligus rovolusioner.

³³ Quraish Shihab, *Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan!Mungkinkah? Kajian atas Konsep dan Pemikiran* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h.73

³⁴ Quraish Shihab, *Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan!Mungkinkah? Kajian atas Konsep dan Pemikiran* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h.75

Syi'ah Zaidiyah menetapkan bahwa *imamah* dapat diemban oleh siapa pun yang memiliki garis keturunan sampai dengan Fatimah, putri Rasul saw, baik dari keturunan putra beliau, al-Hasan bin Ali, maupun al-Husain, dan selama yang bersangkutan memiliki kemampuan keilmuan, adil, dan berani, keberanian yang mengantarnya mengangkat senjata melawan kezaliman. Karena itulah mereka mengutamakan dan memilih Zaid, putra Muhammad al-Baqir, daripada Imam Ja'far ash-Shadiq yang kendati ilmunya melebihi Zaid bahkan membimbing Zaid, namun karena beliau enggan mengangkat senjata, maka mereka menilai tidak wajar menjadi imam. Bahkan jangankan saudara Imam Zaid, yakni Imam Ja'far, kakek mereka pun, yakni Imam Ali Zainal Abidin, tidak diakui sebagai imam oleh Syi'ah Zaidiyah, karena keengganan beliau mengangkat senjata. Imam dalam pandangan Zaidiyah setelah gugurnya Zaid, beralih kepada putranya, Yahya, lalu kepada sejumlah orang, baik dari keturunan yang bersangkutan maupun selainnya selama dia memiliki garis keturunan yang bersambung kepada putri Nabi, Fatimah, dan selama dia tampil mengangkat senjata melawan penguasa yang zalim. Bahkan az-Zaidiyah membenarkan adanya dua atau tiga imam dalam dua atau kawasan yang berjauhan. Agaknya tujuannya adalah untuk memperlemah kekuatan penguasa yang zalim.³⁵

Syi'ah Zaidiyah kendati berkeyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib ra adalah sahabat Nabi yang termulia, bahkan melebihi kemuliaan Abu Bakar dan Umar dan Utsman ra, namun mereka mengakui sahabat-sahabat Nabi itu sebagai khalifah-

³⁵ Quraish Shihab, *Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah? Kajian atas Konsep dan Pemikiran* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h.81

khalifah yang sah. Karena itulah dan karena keengganan mereka mempersalahkan para sahabat Nabi itu, apalagi mencaci dan mengutuk mereka, maka pengikut-pengikut Imam Zaid dinamai dengan *ar-Rafidhah*, yakni penolak (untuk) menyalahkan dan mencaci.³⁶

Az-Zaidiyah dalam konteks menetapkan hukum menggunakan al-Qur'an dan Sunnah, dan nalar. Mereka tidak membatasi penerimaan hadis dari keluarga Nabi semata-mata, tetapi mengandalkan juga riwayat-riwayat dari sahabat-sahabat Nabi yang lain.³⁷

Demikian sekelumit dari pandangan Syi'ah Zaidiyah yang dinilai sebagai kelompok Syi'ah yang paling dekat dengan Ahlusunnah wa al-Jama'ah. Muhammad 'Imarah, cendekiawan mesir kontemporer, menukil dari buku *Talhkish Muhassal Afkar al-Mutaqaddimin wa al-Mutaakhkhirin*, karya Nashiruddin ath-Thusy, mengatakan bahwa syi'ah Zaidiyah menganut paham Mu'tazilah dalam bidang prinsip-prinsip ajaran agama (akidah), bahkan mereka menggunakan tokoh-tokoh Mu'tazilah melebihi pengangguran mereka terhadap imam-imam syi'ah Itsna 'Asyariyah. Sedang dalam hukum-hukum yang berkaitan dengan rincian ajaran agama, mereka banya sejalan dengan pandangan mazhab Abu Hanifah dan sedikit dengan mazhab Syafi'i. Tidak heran jika dalam sekian banyak pesantren di Indonesia,

³⁶ Quraish Shihab, *Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan!Mungkinkah? Kajian atas Konsep dan Pemikiran* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h.81

³⁷ Quraish Shihab, *Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan!Mungkinkah? Kajian atas Konsep dan Pemikiran* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h.82

beberapa buku karya ulama-ulama Zaidiyah dijadikan rujukan, misalnya buku *Nail al-Authar* dalam bidang hadis dan interpretasinya, *Irsyad al-Fuhul* dalam bidang Ushul Fiqih, karya ulama Yaman kenamaan, Muhammad bin Ali asy-Syaukani (1760-1843 M).³⁸

4. Syi'ah Istna 'Asyariyah

Syi'ah Istna 'Asyariyah, biasa juga dikenal dengan nama *Imamiyah* atau *Ja'fariyah*, adalah kelompok syi'ah yang mempercayai adanya dua belas imam yang kesemuanya dari keturunan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah az-Zahra, putri Rasulullah saw.

Kelompok ini merupakan mayoritas penduduk Iran, Irak, serta ditemukan juga di beberapa daerah di Suriah, Kuwait, Bahrain, India, juga di Saudi Arabia, dan beberapa daerah (bekas) Uni Sovyet.³⁹

Karena kelompok ini merupakan mayoritas dari kelompok Syi'ah, maka sewajarnya mereka dan pendapat-pendapat merekalah yang seharusnya diketengahkan ketika berbicara tentang Syi'ah secara umum, bukannya pendapat ketiga tersebut diatas, Ghulat, Ismailiyah, dan Zaidiyah.

³⁸ Quraish Shihab, *Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan!Mungkinkah? Kajian atas Konsep dan Pemikiran* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h.82

³⁹ Quraish Shihab, *Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan!Mungkinkah? Kajian atas Konsep dan Pemikiran* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h.83

Salah satu masalah fikih yang diperselisihkan antara pengikut mazhab syi'ah dan mazhab sunni adalah hukum nikah mut'ah. Ada yang menyatakan halal dan ada yang menyatakan keharamannya, yang menyatakan halal ada yang demikian longgar dan ada juga yang membolehkannya hanya dalam keadaan kebutuhan yang mendesak atau darurat.

Tidak sedikit yang menyalahpahami persoalan ini sehingga ada yang mempersamakannya dengan zina, padahal ulama-ulama yang mengharamkannya pun tidak berpendapat demikian.⁴⁰ Salah satu sebab kesalahpahaman tersebut adalah karena mungkin saja yang dilakukan atas nama nikah mut'ah atau karena mereka yang melakukannya itu tidak mengindahkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh ulama yang menghalalkan nikah mut'ah.

Dalam masalah ini telah disepakati bahwa nikah mut'ah telah disyari'atkan dalam Islam, seperti juga halnya dengan nikah daim (permanen). Semua kaum muslim dari berbagai mazhab dan aliran tanpa terkecuali telah sepakat bahwa nikah mut'ah telah ditetapkan dan disyari'atkan dalam Islam. Bahkan hal itu dapat digolongkan hal *dharuriyyat minaddin* (yang gamblang dalam agama). Al-Qur'an dan al-Sunnah telah menegaskan disyari'atkannya nikah mut'ah. Hanya saja terjadi perbedaan pendapat tentang apakah ia kemudian dimansukhkan atau tidak.⁴¹

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta sampai seks dari nikah mut'ah sampai nikah Sunnah* (Cet. I; Jakarta: Lentera, 2005) h.187

⁴¹ H. Busyairi Ali, *Nikah Mut'ah Halal atau haram?* (Cet I; Banjarmasin: Ar-Risalah Islamic Centre Foundation, 2012), h. 116

Al-Marizi seperti dikutip an-Nawawi mengatakan, “Telah tetap (terbukti) bahwa nikah mut’ah adalah boleh hukumnya diawal Islam ketika menjelaskan sub bab yang ditulis Imam Bukhari: Bab Nahyu an-NAbi saw al-Nikah al-Mut’ah (Bab tentang larangan Nabi saw akan nikah mut’ah pada akhirannya).⁴²

Ulama mazhab syi’ah adalah yang paling tegas menyatakan bahwa hukum kehalalan nikah mut’ah tersebut tidak pernah dihapus dan halal sampai hari kiamat. Adapun sumber hukum yang digunakan oleh mazhab syi’ah sebagai landasan kehalalan nikah mut’ah adalah al-Qur’an, Sunnah (ahlulbayt), ijma’ dan akal, hukum diambil dari imam-imam yang ma’sum. Sebagai konsekuensinya, mereka menolak “ijma” (yang tidak melibatkan para imam mereka) dan qiyas.⁴³ Keterlibatan atau kompetensi imam dalam hukum adalah wajib dan bahkan menjadi rukun agama.⁴⁴

Sesuai dengan prinsip yang dianut kaum syi’ah tersebut, dalam penghalalan nikah mut’ah ulama mereka menggunakan dalil-dalil al-Qur’an dan mengutamakan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh alhulbait.⁴⁵

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ
مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ

⁴² Imam Nawawi, *Al Minhaj Syarj Shahih Muslim bin Hajjaj jilid 9*, bab Nikah al-Mut’ah (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiy, 2001), h.179

⁴³ ⁴³ H. Busyairi Ali, *Nikah Mut’ah Halal atau haram?* (Cet I; Banjarmasin: Ar-Risalah Islamic Centre Foundation, 2012), h. 136

⁴⁴ Fathurrahman Djamil, *filsafat Hukum Islam* (Cet. Ke-3; Jakarta: Logos, 1999), h. 121

⁴⁵ Fathurrahman Djamil, *filsafat Hukum Islam* (Cet. Ke-3; Jakarta: Logos, 1999), h. 121

الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا،
 ﴿٥٦﴾ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ
 ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
 فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

Terjemahnya:

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”

Ayat ini terutama kalimat-kalimat terakhirnya menjelaskan tentang nikah

mut'ah karena berbagai alasan. Thabathaba'i menafsirkan dengan yakin bahwa فَمَا

استمتعتم pada ayat tersebut adalah nikah mut'ah. Ayat tersebut turun pada

periode madinah yaitu pada paruh pertama hijrah Nabi ke Madinah yaitu pada paruh pertama hijrah Nabi ke Madinah.⁴⁶

Menanggapi berbagai asumsi dari yang tidak sependapat dengan maksud kandungan ayat tersebut mengemukakan pendapat seperti, bahwa ayat itu sudah di naskh dengan sebuah surat lain (al-Mu'minun, ayat 5-7) atau yang di naskh dengan sunnah, beliau menyampaikan beberapa argumentasi sebagai berikut.

Bahwa ayat surat an-Nisa' ayat 24 tidak mungkin di-naskh dengan surat al-Mu'minun, sebab periode turun kedua ayat tersebut berbanding terbalik dengan syarat dan kriteria nask, yaitu antara lain bahwa ayat yang berfungsi sebagai nasikh (penghapus) harus turun lebih kemudian dari ayat yang berfungsi sebagai mansukh (yang dihapus). Ayat mut'ah turun di Madinah (sesudah periode Mekah (Makkiyyah)).⁴⁷

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa ayat Mut'ah di-nasakh oleh ayat iddah adalah sebuah kekeliruan, sebab hukum iddah adalah hukum yang berdiri sendiri. Begitu juga asumsi ayat tersebut di-nasakh dengan ayat tahrir adalah sebuah logika yang keliru mengingat ayat tahrir dan mut'ah adalah dua masalah yang berbeda. Kemungkinan bahwa ayat tersebut di nasakh dengan sunnah karena posisinya yang hirarkis (dari yang lebih tinggi ke yang rendah/bertingkat) antara al-

⁴⁶ Muhammad Husein Thabathaba'i, *Al-Mizan Fi Tafsir al-Qur'an jilid 4* (Qum Iran: Mansyurat Jama'ah al-Mudarisin Fi al-Hauzah 'Ilmiyah, 1997), h.279

⁴⁷ H. Busyairi Ali, *Nikah Mut'ah Halal atau haram?*, (Cet I; Banjarmasin: Ar-Risalah Islamic Centre Foundation, 2012), h.140

Quran dan Sunnah, maka kembali ke al-Quran sebagai referensi perumusan hukum adalah lebih utama.⁴⁸

Argumentasi lain bahwa ayat ini menjelaskan nikah mut'ah adalah, bahwa mengartikan ayat tersebut untuk nikah permanen menimbulkan pengulangan hukum yang tak perlu. Sebab, surat an-Nisa menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan hak-hak perempuan, juga disebutkan jenis-jenis pernikahan pada awal surah dengan susunan khusus.

Menyamakan firman Allah *fa mastamta'tum* dengan permanen dan firman Allah *faatuhunna ujurahunna* dengan mahar dan sedekah menjadikan penyebutan hukum yang berulang-ulang.⁴⁹

Dengan memperhatikan ayat-ayat tersebut akan diketahui bahwa ayat-ayatnya menjelaskan jenis-jenis pernikahan dengan susunan khusus. Hal itu terwujud, kecuali dengan mengartikan kandungan ayat tersebut dengan nikah mut'ah, sebagaimana yang terlihat pada lahiriyah ayat tersebut. Kepastian bahwa ayat yang dimaksud memenuhi asumsi diatas dapat ditambahkan dengan penjelasan para sahabat seperti Ibn Abbas, Ubay bin Ka'ab dan lain-lain.⁵⁰

⁴⁸ Muhammad Husein Thabathaba'i, *Al-Mizan Fi Tafsir al-Qur'an jilid 4* (Qum Iran: Mansyurat Jama'ah al-Mudarisin Fi al-Hauzah 'Ilmiyah, 1997), h.282

⁴⁹ Ibnu Mustafa, (ed.), *perkawinan Mut'ah dalam Perspektif Hadis dan Tinjauan Masa Kini* (Jakarta: Lentera Basritama, 1999), h.19

⁵⁰ Abu Ja'far Muhammad ibn Ya'kub al-Kulaini, *al-Kafi juz 5* (Qum Iran: Dar al-adhwa, 1996), h.448

Kata *Istamta'a*, dalam ayat 24 surat an-Nisa ini mengandung makna nikah mut'ah. Karena nama ini telah digunakan oleh para sahabat Nabi saw pada saat turunnya ayat ini.

Keismpulan bahwa hukum nikah mut'ah diambil dari ayat ini diperkuat oleh riwayat dari kalangan ahli tafsir terutama dari mazhab Imam Ahlulbait.⁵¹

Dalil-dalil hadis yang dipergunakan kaum syi'ah tentang nikah mut'ah, diantaranya dalam kitab al-Kafi, dengan sanad dari Abu Bashir, ia berkata, aku bertanya kepada Abu Ja'far as tentang nikah mut'ah, maka ia berkata: "Mut'ah itu diturunkan melalui al-Quran"⁵²:

سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعت, فقال نزلت في القرآن : فما استمتعتم به منهنّ فا
توهنّ فريضة فلا جناح عليكم فيما تراضيتن به من بعد الفريضة

Dalam kitab yang sama, dengan sanad dari Ibnu Abi 'Amir, dari orang yang menyebutkan dari Abi Abdillah (as), ia berkata: "*Sungguh hukum Mut'ah itu telah diturunkan; apabila kamu menikahi salah seorang diantara mereka, sampai waktu yang telah ditentukan, berikanlah kepada mereka maharnya sebagai suatu kewajiban*"

⁵¹ H. Busyairi Ali, *Nikah Mut'ah Halal atau Haram?* (Cet.I; Banjarmasin: Ar-Risalah Islamic Centre Foundation, 2012), h.141

⁵² H. Busyairi Ali, *Nikah Mut'ah Halal atau haram?*, (Cet I; Banjarmasin: Ar-Risalah Islamic Centre Foundation, 2012), h142

Dalam kitab yang sama juga ada sebuah riwayat dari Muhammad Ibn Ismail, dari al-Fadhal bin Syadzin, dari Shafwan ibn Yahya, dari Masakin dari Abdillah ibn Sulaiman berkata:

سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : كان علي عليه السلام يقول : لو لا ما سبقني به ابن الخطاب ما زني الآن شفي.

Artinya:

“Aku telah mendengar Abu Ja’far as berkata: Bahwasanya Ali as berkata, kalaulah Umar bin Khattab tidak mendahului aku tentang perkara mut’ah maka tidak akan terjadi perzinaan terkecuali orang yang rusak akalnya.”

BAB III

ANALISIS PEMIKIRAN ULAMA SUNNI DAN SYI'AH TENTANG NIKAH MUT'AH

A. Pandangan Ulama Sunni tentang Nikah Mut'ah

1. Pemikiran Yusuf al-Qardhawi

Yusuf al-Qardhawi adalah seorang ulama kontemporer yang ahli dibidang hukum Islam, ia juga dikenal sebagai seorang ilmuwan yang memiliki banyak kreatifitas dan aktifitas dan berperan aktif di lembaga pendidikan. Qardhawi termasuk pengarang yang produktif. Ia telah menghasilkan banyak karya ilmiah baik berupa buku, artikel maupun hasil penelitian yang tersebar luas di dunia Islam. Salah satu karyanya yaitu “Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam” yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul “*Halal dan Haram dalam Islam*”. Dalam karyanya tersebut ia menjelaskan tentang keharaman nikah mut'ah.

Yusuf al-Qardhawi mengemukakan perkawinan dalam Islam adalah suatu ikatan yang kuat dan perjanjian yang teguh yang ditegakkan diatas landasan niat untuk bergaul antara suami-istri dengan abadi supaya dapat memetik buah kejiwaan yang telah digariskan Allah dalam al-Quran yaitu ketentraman, kecintaan dan kasih sayang, yang tujuannya adalah bersifat duniawi yaitu demi berkembangnya keturunan dan kelangsungan jenis manusia. Sedangkan kawin mut'ah adalah ikatan seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam batas waktu tertentu dengan upah tertentu pula. Sehingga menurut beliau, tidak mungkin kawin mut'ah ini dapat menghasilkan arti perkawinan sebagaimana yang telah disebutkan di atas.¹

¹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), h.260

Kawin mut'ah ini pernah diperkenankan oleh Rasulullah saw sebelum stabilnya syari'ah Islamiyah, yaitu diperkenankannya ketika dalam bepergian dan peperangan kemudian diharamkannya untuk selama-lamanya.

Rahasia dibolehkannya nikah mut'ah waktu itu ialah karena masyarakat Islam waktu itu masih dalam suatu perjalanan yang diistilahkan dengan *masa transis*, masa peralihan dari jahiliah kepada Islam,, sedang perzinahan di masa jahiliyah merupakan satu hal yang biasa dan terjadi dimana-mana. Maka, setelah Islam datang dan menyerukan kepada pengikutnya untuk pergi berperang dan jauhnya mereka dari istri merupakan suatu penderitaan yang cukup berat. Sebagian mereka ada yang imannya kuat dan ada pula yang lemah. Yang imannya lemah akan mudah untuk berbuat zina sebagai suatu perbuatan yang keji dan cara yang tidak baik.²

Bagi mereka yang kuat imannya berkeinginan untuk kebiri dan mengimpotkan kemaluannya, seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud:

كُنَّا نَفْرُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ لَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا : أَلَا نَسْتَخْصِي؟
فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَٰلِكَ وَرَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِأَثْوَبَ
إِلَى أَجَلٍ.

Artinya:

“kami pernah berperang bersama Rasulullah saw sedangkan istri kami tidak turut serta bersama kami kemudian kami bertanya kepada Rasulullah, apakah boleh kami kebiri? Maka, Rasulullah saw melarang kami berbuat demikian dan memberikan rukhsah supaya kami kawin dengan perempuan dengan maskawin baju untuk satu waktu tertentu.” (riwayat bukhari dan Muslim)

² Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), h.261

Dengan demikian, dibolehkannya kawin mut'ah adalah sebagai suatu jalan untuk mengatasi problema yang dihadapi oleh kedua golongan tersebut dan merupakan jenjang menuju diundangkannya hukum perkawinan yang sempurna, yakni dengan hukum tersebut akan tercapailh seluruh tujuan perkawinan seperti terpeliharanya diri, ketenangan jiwa, berlangsungnya keturunan, kecintaan, kasih sayang, dan luasnya daerah pergaulan kekeluargaan karena perkawinan itu.³

Menurut pendapat kebanyakan sahabat, haramnya mut'ah itu berlaku selamanya, tidak ada sedikitpun rukhshah, sesudah hukum tersebut diundangkan. Tetapi, Ibnu Abbas berpendapat lain, ia berpendapat boleh ketika terpaksa, yaitu seperti tersebut dibawah ini:

فَقَدْ سَأَلَهُ سَائِلٌ عَنِ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرَّ خَصَّ لَهُ فَقَالَ لَهُ مَوْلَى لَهُ : إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَالِ الشَّدِيدِ، وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ أَوْ نَحْوُهُ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : نَعَمْ.

Artinya:

“Ada seseorang bertanya tentang kawin mut'ah, kemudian ia membolehkannya. Lantas seorang bekas hambanya bertanya: Apakah yang demikian itu dalam keadaan terpaksa dan karena sedikitnya jumlah wanita atau yang seperti itu? Ibnu Abbas menjawab: Ya!” (Riwayat Bukhari)

Kemudian, setelah Ibnu Abbas menyaksikan sendiri, bahwa banyak orang yang mempermudah persoalan ini, dan tidak membatasi dalam situasi yang terpaksa, maka ia hentikan fatwanya itu dan ditarik kembali.⁴

³ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), h.261

⁴ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), h. 262

2. Pemikiran Jalaluddin al-Suyuti

Jalaluddin al-Suyuti adalah seorang ulama dan cendekiawan Muslim yang hidup pada abad ke-15 di Kairo, Mesir. Semasa hidupnya, Imam Suyuti menulis banyak buku tentang berbagai hal, seperti hadits, al-Quran, bahasa, hukum Islam, dan lainnya. Salah satu karyanya yang di dalamnya beliau mengemukakan pemikirannya mengenai hukum nikah mut'ah.

Menurut Imam Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab tafsirnya, ayat yang turun berkaitan dengan hukum nikah mut'ah adalah al-Quran surat al-Mu'minin ayat 5-7. Penjelasan itu ia sampaikan ketika menafsirkan surah an-Nisa ayat 24

Dalam menjelaskan ayat diatas, ia menukil sebuah hadits yang bersumber dari Ibnu Abbas sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَتْ الْمُتْعَةُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ وَكَأَنَّا يَقْرَأُونَ هَذِهِ الْآيَةَ : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى

Menurut keterangan ini bahwa nikah mut'ah adalah sesuatu yang pernah dibolehkan pada awal Islam dengan berdasarkan ayat surah an-Nisa ayat 24 tersebut. Kemudian datanglah hukum yang lain setelah itu yang menghapus kebolehan nikah mut'ah menjadi sesuatu yang terlarang dengan menyebutkan surah al-Mu'minin ayat 6 yang berbunyi: إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ dengan pengertian bahwa *farj* yang halal untuk dinikmati hanyalah *farj* istri yang sah dan budak yang dimiliki,

sedangkan wanita dalam nikah mut'ah bukanlah istri dan bukan pula budak yang dilimiki.⁵

Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab tafsirnya bahwa ayat dalam surah an-Nisa ayat 24 diatas telah sudah dimansukh hukumnya setelah turun ayat dari surah al-Mu'minun ayat 6 (إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ)⁶ selain itu

dalam kitab yang sama ia juga menjelaskan bahwa ayat yang sama, Abu Dawud, Ibnu Mundzir dan an-Nuhas meriwayatkan dari Atha' dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa ayat فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَأَنتُمْ أَجُورُهُنَّ فَرِيضَةٌ عَلَيْكُمْ dimansukh oleh ayat-ayat sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ...

Terjemahnya:

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).⁷ (Qs. At-Thalaq:1)

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

⁵ Jalaluddin al-Suyuti, *al-Dur al-Mantsur*, Juz 2, h.484

⁶ Jalaluddin al-Suyuti, *al-Dur al-Mantsur*, Juz 2, h.485

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Toha Putra, 1996), h.445

Terjemahnya:

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'⁸ ... (Qs. Al-Baqarah: 228)

وَأَلِّ يَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ

Terjemahnya:

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan⁹ ... (Qs. At-Thalaq: 4)

Dalam kitab yang sama Imam al-Suyuti menjelaskan bahwa ayat tentang mut'ah diatas juga dimansukh oleh ayat tentang waris berdasarkan riwayat dari Abu dawud, Ibnu Mundzir, an-Nuhas dan al-Baihaqi bahwa Said bin Musayyab berkata:

عن سعيد بن المسيب قال : نسخت اية الميراث المنة

Dalam kitab yang sama Imam al-Suyuti juga membawa pendapatnya Abdurrazaq dan Ibnu Mundzir yang meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud:

عن ابن مسعود قال : المنة منسوخة نسخها الطلاق والصدقة والعدة والميراث

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Toha Putra, 1996), h.28

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Toha Putra, 1996), h.446

3. Pemikiran Ibnu Katsir

Ibnu Katsir adalah seorang ulama yang terkemuka dalam bidang tafsir al-Quran dan telah mempersembahkan karya besarnya kepada dunia Islam yaitu Tafsir Ibnu Katsir. Kecermatan dan kepiawaiannya dalam menafsirkan ayat-ayat al-Quran yang mulia, menjadikan kitab tafsirnya itu sebagai kitab rujukan dan kajian hamper semua majelis kajian tafsir diseluruh dunia Islam. Tidak bias dipungkiri kedalaman kajian dan terjadinya banyak pengulangan di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, menjadikan kitab itu tebal dan berjilid-jilid.

Dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mejelaskan penafsirannya pada surah an-Nisa ayat 24 yang berkenaan dengan nikah mut'ah. Dimana beliau mengemukakan bahwa keumuman makna ayat ini dijadikan dalil yang membolehkan nikah mut'ah, dan tidak diragukan lagi nikah mut'ah memang disyariatkan pada masa permulaan Islam, kemudian sesudah itu dimansukh.

Dalam penjelasan imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, pemansukhan ayat tentang nikah mut'ah yang merubah hukumnya dari yang halal menjadi yang haram merupakan sesuatu yang sudah menjadi Ijma' ulama dikalangan Jumhur Ulama termasuk Imam Syafi'i.¹⁰

Orang yang menginterpretasikan ayat ini bermakna nikah mut'ah sampai batas waktu yang ditentukan mengatakan, “tidak ada dosa bagi kalian apabila waktunya

¹⁰ Abu Fida' Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 5....., h. 11

telah habis untuk saling merelakan (bernegosiasi) untuk penambahan masa nikah mut'ah dan penambahan imbalannya.”.¹¹

Dalam tafsir Ibnu Katsir juga mengemukakan pendapat as-Saddi yang mengatakan, “jika pihak lelaki menghendaki, boleh merelakan pihak wanita sesudah mahar yang pertama, yakni upah yang telah diberikannya kepada pihak wanita sebagai imbalan menikmati tubuhnya sebelum masa berlaku nikah mut'ah yang disepakati kedua belah pihak habis. Untuk itu pihak laki-laki berkata kepada pihak perempuan, ‘aku akan mut'ah lagi denganmu dengan imbalan sekian dan sekian’, jika upah bertambah sebelum pihak wanita membersihkan rahimnya pada hari habisnya masa mut'ah diantara keduanya, maka hal inilah yang disebutkan di dalam firman-Nya:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِضَةِ

Terjemahnya:

‘dan tiada mengapa bagi kalian terhadap sesuatu yang kalian telah saling merelakannya sesudah menentukan faridah itu’ (surah an-Nisa :4)

Yang dimaksud dengan saling merelakan menurut Ibnu Katsir adalah apabila pihak laki-laki memberikan mahar secara sempurna kepada pihak wanita, kemudian

¹¹ Abu Fida' Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 5....., h. 11

pihak lelaki menyuruh pihak wanita menentukan pilihan, antara tetap menjadi istri atau berpisah (cerai).¹²

B. Pandangan Ulama Syi'ah tentang Nikah Mut'ah

1. Pemikiran Muhammad Husein Thabathaba'i

Ketika kita akan menelusuri sejarah perkembangan tafsir, maka akan didapati perbedaan cara dan metode para mufassir dalam menafsirkan al-Quran. Perbedaan itu disebabkan perbedaan pola fikir, aliran filsafat, teologi, mazhab fiqh yang mereka anut. Dalam menafsirkan ayat mereka terkontaminasi dengan lingkungan keilmuannya.

Thabathaba'i adalah seorang mufassir yang menafsirkan ayat-ayat al-Quran menuju kepada maksud yang terkandung didalamnya. Dalam menjelaskan maksud dan makna ayat al-Quran terlebih dahulu ia merujuk kepada al-Quran itu sendiri sebelum merujuk kepada sumber lain.¹³ Prosesi ini dapat dikatakan Thabathaba'i ingin memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada al-Quran untuk berbicara sendiri sebelum di tafsirkan dalam pandangan atau pendapat peibadi. Diantara pandangan yang lain yang dimasukkan kedalam tafsirnya adalah pendapat dan pemikiran yang telah diujiterlebih dahulu dan diakui kesahihannya. Disinilah ia ingin

¹² Abu Fida' Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 5....., h. 12

¹³ Thabathaba'i, *Mengungkap Rahasia al-Quran*, terj. A Malik Madani dan Hamim Ilyas, (Bandung: Mizan, 1994), h.10

tidak terjadinya pengaruh terhadap para pemikir dalam pemikirannya apalagi pemikiran atau mazhab lain.

Dari salah satu sudut pandang metode penafsiran tafsir al-Mizan adalah tafsir Tahlili.¹⁴ Thabathaba'i dan alam tafsirnya ini mengikuti runtutan ayat sebagaimana dalam Mushaf, dan menafsirkan ayat demi ayat mulai dari surat al-Fatihah sampai dengan surat an-Nas. Dilain sisi, tafsir ini menggunakan metode Mawdhu'i (tematik). Mufasssir dalam kitab ini menetapkan pemahaman beberapa kandungan ayat dalam setiap surat. Tema-tema tersebut dikaitkan dengan berbagai aspek pembahasan, yaitu: Pembahasan Qurani, rawi (riwayat), falsafi, ijma' (sosial), tarikh (sejarah), akhlak, ilmi, isyari (tasawwuf), dan aspek hukum fiqh.¹⁵

Salah satu karya terbesar Muhammad Husein Thabathaba'i yaitu tasir al-Mizan dimana di dalamnya dijelaskan dasar penafsiran nikah mut'ah menurut Muhammad Husein Thabathaba'i yang terdapat dalam surat an-Nisa ayat 24.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا
وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ

¹⁴ Tafsir Tahlili (analitis) atau yang juga disebut dengan tafsir tajzi'i merupakan suatu metode yang bermaksud menjelaskan dan menguraikan kandungan ayat-ayat al-Quran dari seluruh sisinya, sesuai dengan urutan ayat didalam suatu surat. Dalam tafsir ini ayat ditafsirkan secara komprehensif dan menyeluruh baik dengan corak ma'tsur maupun ra'yi. Unsur-unsur yang dipertimbangkan adalah azbabun nuzul, munasabah ayat dan juga makna harfiyah setiap kata. Azyumardi Azra dalam Munzir Hitami, *Menangkap Pesan-pesan Allah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2005), h.47

¹⁵ Abd. Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir al-Mawdhu'i: Suatu Pengantar*, terj. Suryan A. Jamrah, (Jakarta: Grafindo Persada, 1996), h.12

مِنْهُمْ فَآتُوهُمْ أَجُورَهُمْ بِفَرِيضَةٍ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ
الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana¹⁶

Menurut Thabathaba'i, di dalam kitab tersebut secara jelas dikemukakan

bahwa yang dimaksud dengan kata (اسْتَمْتَعْتُمْ), adalah untuk istilah nikah mut'ah,

tanpa diragukan.¹⁷ Ayat ini adalah ayat Madaniyah yang terdapat dalam al-Quran surat an-Nisa' ayat 24, turun pada pertengahan masa setelah Nabi Muhammad saw hijrah dari Makkah ke Madinah, hal ini dapat di buktikan dengan ayat-ayat lain, dan tidak diragukan bahwa nikah bentuk ini terjadi dan dilakukan oleh para sahabat pada saat itu. Banyak riwayat yang menjelaskan peristiwa nikah mut'ah ini, yaitu

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Toha Putra, 1996), h.65

¹⁷ Muhammad Husein Thabathaba'i, *al-Mz n fi Tafsir al-Quran*, Jilid IV (Beirut: Muassasah al-Islam, 1991 M), h. 271

pernikahan yang telah ada di tengah-tengah Nabi saw, ia dilihat dan didengar dari Nabi saw. Nikah ini tidak diungkap kecuali dengan lafaz (istilah) *mut'ah*.¹⁸

Menurut Thabathaba'i surat an-Nisa ayat 24 adalah dasar hukum nikah *mut'ah* dan pengertian ini dikutip oleh orang-orang terdahulu, yakni para mufassir kalangan sahabat dan tabi'in seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Qatada, Mujahid, Saddiy, Ibnu Jubair, al-Hasan dan lain-lain, termasuk juga mazhab imam-imam Ahlul Bait'alaihissalam.

2. Pemikiran Muhammad Husain Fadhlullah

Nikah *mut'ah* merupakan hal yang diperselisihkan antara kaum Muslim Syi'ah dan Ahlusunnah, dimana kaum Muslim sepakat bahwa Nabi saw mensyariatkan perkawinan ini dalam situasi-situasi khusus. Tetapi sekelompok dari Ahlusunnah (sunni) berpendapat bahwa saw mencabut syariat ini dan menghapus hukum ini. Dengan demikian, kehalalan tersebut berubah menjadi keharaman. Tetapi, sumber-sumber Islam Syi'ah meriwayatkan bahwa itu belum dihapus, dan pelarangan tersebut justru berasal dari sahabat Umar sepeninggal Nabi saw, dan pelarangan itu tidak datang dari Nabi sendiri. Jika memang disepakati bahwa tak seorang pun berwenang untuk mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Rasulullah saw, maka kita harus menafsirkan pengharaman sahabat Umar bin Khattab terhadap nikah

¹⁸ Muhammad Husein Thabathaba'i, *al-Mz n fi Tafsir al-Quran*, Jilid IV (Beirut: Muassasah al-Islam, 1991 M), h. 272

mut'ah sebagai bentuk penghormatan administratif (*tahrim idary*), yang brtitik tolak dari kepentingan terbatas dalam masa tertentu.¹⁹

Sayid Muhammad Husein Fadhlullah, seorang ulama besar Lebanon, Mujtahid dan marja' yang memiliki banyak pengikut, mengemukakan pandangan-pandangan dan kritikan-kritikannya secara berani, cermat dan mendalam, dengan menghindari pembahasan teori yang muluk-muluk atau bertele-tele. Dalam menanggapi hal di atas Sayid Muhammad Husain Fadhlullah mengemukakan bahwa jika memang faktor keperluan menjadikan nikah mut'ah diperbolehkan, dan itu merupakan kesadaran Nabi saw untuk melindungi kaum Muslim pada sebagian peperangan dari tekanan seksual, maka keperluan ini ada pada setiap zaman dan tempat. Banyak orang yang mengalami tekanan seksual tapi mereka tidak mampu untuk menikah. Apabila faktor keperluan (darurat) itulah yang mendikte Rasulullah saw untuk memberlakukan hukum nikah mut'ah, maka keperluan tersebut tidak hanya terbatas pada zaman itu dan tempat itu, tetapi ia sekarang jauh lebih mendesak dibandingkan dengan zaman Nabi saw. Maka, tidak ada hal yang membenarkan bahwa nikah mut'ah telah di hapus, karena ia adalah suatu keperluan bagi setiap generasi, kapan saja dan dimana saja.²⁰

¹⁹ Sayid Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia waita dalam Islam*, penerjemah Muhammad Abdul Qadir Alkaf, (Jakarta: Lentera, 2000), h.256

²⁰ Sayid Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia waita dalam Islam*, penerjemah Muhammad Abdul Qadir Alkaf, (Jakarta: Lentera, 2000), h.257

Dalam karya Sayid Muhammad Husain Fadhlullah dikatakan bahwa hukum-hukum yang terdapat dalam al-Quran tentang perkawinan, talak, 'iddah, dan warisan tidak berkaitan dengan perkawinan sementara. Oleh karena itu, ia tidak syar'i (tidak sah). Diantara ayat itu adalah:

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali atas iastri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela.” (Qs. al-Mu'minun: 5-6)

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antar perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 'iddahnya) maka 'iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.” (Qs. at-Thalaq: 4)

“ Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghdapi) 'iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu 'iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat lalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu hal yang baru.” (Qs. at-Thalaq:1)

Ayat pertama, mencakup perkawinan permanen (nikah daim) dan perkawinan sementara (nikah mut'ah). Firman Allah dalam surat al-Mu'minun ayat 5-6 juga meliputi istri permanen dan istri sementara. Wanita yang mengadakan akad nikah

mut'ah akan menjadi istri (istri sementara), tidak ada perbedaan antara ia dan wanita yang dinikahi seorang lelaki lalu setelah itu diceraikan.²¹

Dalam ayat tersebut Allah tidak menyebutkan bahwa itu adalah perkawinan sementara dan juga tidak menyebutkan bahwa itu adalah perkawinan permanen. Oleh karena itu, maka istri tetap istri, baik ia mengadakan nikah daim atau nikah mut'ah.

Adapun ayat-ayat yang berhubungan dengan 'iddah dan talak khusus diberlakukan bagi perkawinan permanen setelah terjadi percampuran (*dukhul*), bukan untuk semua bentuk perkawinan, karena perkawinan dalam sebagian keadaan tidak disertai dengan 'iddah, seperti bila perkawinan tidak diikuti dengan percampuran atau perkawinan terjadi setelah masa monopause. Maka 'iddah tidak selalu menjadi ciri khas perkawinan permanen. 'Iddah yang tersebut dalam ayat yaitu tiga kali suci (*tsalash quru'*) atau lebih, merupakan kekhususan perkawinan permanen, sedangkan dalam perkawinan sementara jika terjadi percampuran juga disertai dengan 'iddah, yaitu dua kali haid atau empat puluh lima hari.²²

Memang benar al-Quran tidak menyebutkan 'iddah perkawinan sementara (perkawinan mut'ah), karena al-Quran al-Karim tidak membicarakan rincian hukum-hukum perkawinan sementara, karena perkawinan yang tersebut dalam surat an-Nisa ayat 24 disinggung secara terperinci oleh sunnah (Hadis), dan pembatasan 'iddah

²¹ Sayid Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia waita dalam Islam*, penerjemah Muhammad Abdul Qadir Alkaf, (Jakarta: Lentera, 2000), h.263

²² Sayid Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia waita dalam Islam*, penerjemah Muhammad Abdul Qadir Alkaf, (Jakarta: Lentera, 2000), h.263

dalam al-Quran, surat al-Baqarah ayat 228 termasuk dari bagian hukum-hukum perkawinan permanen dan bukan dari bagian perkawinan secara mutlak. Begitu juga talak, ia hanya termasuk bagian hukum-hukum perkawinan biasa, karena perkara perkawinan sementara terletak ditangan kedua belah pihak yang bersangkutan.²³

Adapun hadis yang diriwayatkan bahwa Ali as berkata:

“sesungguhnya Rasulullah saw melarang mut’ah nisa’ (perempuan) pada hari khaibar, dan melarang untuk memakan keledai piaraan.”

Itu menunjukkan bahwa Nabi saw menghalalkan mut’ah dan tidak pernah mengharamkannya pada suatu waktu. Mereka meriwayatkan dari Imam Ali as,

“ Seandainya Umar tidak melarang nikah mut’ah, niscaya tidak ada orang yang berzina kecuali sedikit saja atau orang yang celaka.”

Sangat populer sekali perihal kehalalan nikah mut’ah dan para imam pun menganjurkannya. Mereka adalah putra-putra Ali as, dan lebih mengetahui apa yang harus dikatakan untuk mereka. Ini menunjukkan bahwa riwayat tersebut tidak benar.

Adapun riwayat lain yang dinisbatkan kepada Imam Ali as, yaitu:

“Aku tidak mengetahui (melihat) seseorang melakukan mut’ah dan dia muhsan (terikat dengan suatu perkawinan), maka (bila aku melihatnya) sungguh aku akan merajamnya dengan batu.”

Kaum Muslim Syi’ah pastikan bahwa hadis ini tidak berasal dari Imam Ali as, karena sebagaimana telah kami sebutkan bahwa yang dipastikan adalah pernyataannya. Begitu juga, anak-anak Imam Ali as, yaitu para imam, yang banyak berpegangan dalam hadis-hadis yang mereka riwayatkan tentang syariat dengan kitab

²³ Sayid Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia waita dalam Islam*, penerjemah Muhammad Abdul Qadir Alkaf, (Jakarta: Lentera, 2000), h.263

Imam Ali as yang mereka warisi turun temurun, tidak mungkin mereka berselisih pendapat dengannya. Masalah ini bukanlah masalah ijtihad yang dilakukan Imam Ali as, yang kemudian ditentang oleh sebagian anak-anaknya, karena Imam Ali as meriwayatkan dari Rasulullah saw dan beliau mengetahui syariat dengan sempurna melalui “sentuhan tangan” Rasulullah saw. Beliau juga seorang yang terjaga dari dosa (ma’sum) menurut pandangan Syi’ah Imamiyah, begitu juga iman-imam yang lain.²⁴

Ketika kita membaca sejarah para imam ahlulbait, kita menemukan penegasan dari mereka untuk melakukan nikah mut’ah, sampai pada batas bahwa mereka menganjurkan para pengikut merek untuk mempraktekannya meskipun sekali sepanjang umur, agar hukum pengharamannya yang berasal dari khalifah kedua tidak sampai menguasai realitas dan nikah ini akan menjadi hilang sepenuhnya dari peredaran. Mereka menginginkan agar manusia melakukannya meskipun mereka tidak begitu perlu kepadanya, agar syariat ini tetap langgeng di tengah-tengah masyarakat.²⁵

Kaum Muslim dari kalangan Syi’ah berpendapat bahwa setelah ditetapkan keabsahannya dengan nas, perkawinan sementara merupakan solusi untuk memecahkan problem seksual yang tidak sepenuhnya berhasil ditanggulangi oleh perkawinan biasa (daim). Bukti dari itu adalah kita melihat sepanjang sejarah bahwa hubungan-hubungan gelap selalu mengiringi hubungan-hubungan sah, dan itu

²⁴ Sayid Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia waita dalam Islam*, penerjemah Muhammad Abdul Qadir Alkaf, (Jakarta: Lentera, 2000), h.268

²⁵ Sayid Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia waita dalam Islam*, penerjemah Muhammad Abdul Qadir Alkaf, (Jakarta: Lentera, 2000), h.269

merupakan pengakuan realistis bahwa hubungan sah tidak mampu mengatasi secara penuh kebutuhan manusia kepada seks. Sebab, terdapat situasi-situasi dan waktu-waktu tertentu dimana perkawinan permanen tidak dapat diterapkan secara praktis, sehingga menjadikan manusia berhadapan dengan tekanan kuat naluri seks. Jika kita mengharamkan atasnya semua hubungan diluar ikatan perkawinan permanen, dan jika kita tidak memberinya jalan keluar sementara, berarti dia akan terjerumus dalam keharaman atau justru merasakan kesulitan yang luar biasa. Oleh karena itu, kami katakan sesungguhnya perkawinan mut'ah merupakan solusi sementara disamping perkawinan permanen. Adanya nikah mut'ah merupakan sarana untuk menyempurnakan pemecahan problem seksual dalam kehidupan manusia. Dan barangkali karena inilah Nabi saw mensyariatkan melalui perintah Allah pada suatu waktu. Apabila pemberlakuan syari'at nikah mut'ah berasal dari adanya suatu tekanan tertentu dalam persoalan seksual, maka alasan-alasan ini tetap ada disepanjang zaman dan kapan saja, sehingga tidak dibenarkan bahwa hal itu telah dihapus.²⁶

3. Pemikiran Ayatullah Sayyid Muhammad al-Musawi

Ayatullah Sayyid al-Musawi adalah seorang ulama ja'fari. Salah satu karya Ayatullah Sayyid al-Musawi yang populer yaitu Mazhab Pencinta Keluarga Nabi, buku tersebut merupakan rekaman dari sebuah diskusi yang terjadi di kota Peshawar, sebuah kota kecil yang terletak di dekat perbatasan Pakistan dan Afganistan dimana

²⁶ Sayid Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia waita dalam Islam*, penerjemah Muhammad Abdul Qadir Alkaf, (Jakarta: Lentera, 2000), h.261

Ayatullah Sayid al-Musawi bersedia menjawab berbagai persoalan yang berkenaan dengan mazhab yang dianutnya.

Dari salah satu hasil rekaman diskusi, beliau menjelaskan pendapatnya tentang nikah mut'ah. Menurut beliau dalil tentang syariat nikah mut'ah sangat jelas dalam al-Quran sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 24. Ini adalah betul-betul hukum Allah yang jelas dan tidak dihapus oleh ayat yang lain, maka hukumnya tetap berlaku hingga akhir zaman, karena yang halal bagi Muhammad juga halal hingga hari kiamat dan keharamannya adalah haram hingga hari kiamat.

Dalam surat an-Nisa ayat 24 dijelaskan syariat *istamta'* (menikmati) dari wanita dan membayar mahar yang diwajibkan, dan *istimta'* itu adalah nikah mut'ah atau nikah mu'aqqat. Dan bentuk ketiga dari syariat nikah adalah mengawini budak-budak yang dimiliki. Allah berfirman:

“Dan barangsiapa diantara kamu (orang-orang merdeka) yang tidak cukup pembelanjanya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, dia boleh mengawini wanita beriman dari budak-budak yang kamu miliki.”

Kalau saja *istamta'* itu mencakup pernikahan yang selamanya saja niscaya hukum-hukum kawin yang terdapat dalam satu surat yang sama dan diulang-ulang, ini yang tidak mungkin ditujukan hanya hanya untuk permainan belaka karena firman Allah itu terhindar dari sesuatu yang sia-sia. Kami dapatkan bahwa kalimat dan ungkapan yang terdapat pada surat an-Nisa ayat 2-3 berbeda. Pada surat an-Nisa ayat 2 Allah berfirman, *maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi... dan berilah*

*mereka maskawinnya. Dan pada ayat 3 Allah berfirman: Maka pada wanita yang telah kamu nikmati, kamu berikan kepada mereka maharnya*²⁷.

Kata “nikah” diganti dengan “*istimta*” dan “shadaqah” dengan “mahar”. Sejarawan juga telah menyebutkan bahwa kaum Muslimin pada masa Rasulullah, menikah dengan pernikahan Mut’ah yaitu pernikahan yang dibatasi oleh waktu tertentu. Apabila ayat tentang nikah mut’ah sangkaan anda sekalian adalah pernikahan yang selamanya bukan pernikahan dengan batasan, maka ayat manakah yang dipahami oleh kaum Muslimin yang menjelaskan tentang pernikahan mut’ah?

Seperti yang diketahui bahwa menurut ulama sunni dalam al-Quran terdapat ayat yang menghapus nikah mut’ah yaitu firman Allah dalam surat al-Mu’minun ayat 6. Namun, Ayatullah Sayid Muhammad al-Musawi mengemukakan bahwa ayat tersebut tidak menunjukkan penghapusan hukum nikah mut’ah, akan tetapi ayat itu menjelaskan tentang hak-hak perkawinan. Ayat yang terdapat dalam surat al-Mu’minun ini juga turun di Mekah sedangkan disyariatkannya nikah mut’ah terdapat dalam surat an-Nisa yang merupakan surat Madaniyah. Oleh karena itu bagaimana mungkin ayat yang menghapus turun lebih awal daripada ayat yang dihapus?²⁸

Selain itu, dalam sebuah perkawinan warisan dan nafkah bukanlah termasuk dalam kelaziman. Para ulama dari kalangan Syi’ah dan Sunni telah berfatwa bahwa istri dari ahli kitab dan wanita nuzuz, yang membunuh suaminya tidak mendapat

²⁷ Ayatullah Sayyid Muhammad al-Musawi, *Mazhab Pencinta Keluarga Nabi*, penerjemah Muthahari Press (Bandung: Mpress, 2009), h. 670

²⁸ Ayatullah Sayyid Muhammad al-Musawi, *Mazhab Pencinta Keluarga Nabi*, penerjemah Muthahari Press (Bandung: Mpress, 2009), h.672

warisan dan tidak pula dinafkahi, namun dia mengetahui bahwa hukum perkawinan masih berlaku. Oleh karena itu sang istri masih belum dibolehkan menikah dengan pria lain. Dia wajib melakukan iddah kematian selama 4 bulan sepuluh hari setelah suaminya meninggal.²⁹

Adapun talak pada nikah mut'ah masa iddahnya berakhir apabila pernikahan itu telah sampai pada waktu yang telah ditentukan, atau apabila suaminya mengundurkan diri dari perkawinan meskipun waktunya masih tersisa dan melepaskan diri dari haknya. Bagi istri yang ditalak seperti itu mengalami masa iddahnya selama empat puluh lima hari, atau yang lebih dikenal dengan istilah 'wanita itu mengalami masa suci sebanyak 2 kali'. Adapun seandainya pria itu meninggal dunia sebelum waktu yang telah ditentukan berakhir maka wajib bagi wanita itu untuk beriddah empat bulan sepuluh hari dan itu sama dengan istri yang ditinggal mati oleh suaminya.³⁰

Dan juga Ayatullah Sayid Muhammad al-Musawi menanggapi tentang ulama Sunni yang meriwayatkan riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi menghapus hukum nikah mut'ah, sebagian menunjukkan bahwa penghapusan itu terjadi ketika pembukaan kota Khaibar, dan sebagian yang lain mengatakan penghapusan terhadap hukum nikah mut'ah itu ketika pembukaan kota Makkah dan sebagian yang lain mengatakan penghapusan hukum nikah mut'ah itu terjadi pada

²⁹ Ayatullah Sayyid Muhammad al-Musawi, *Mazhab Pencinta Keluarga Nabi*, penerjemah Muthahari Press (Bandung: Mpress, 2009), h.673

³⁰ Ayatullah Sayyid Muhammad al-Musawi, *Mazhab Pencinta Keluarga Nabi*, penerjemah Muthahari Press (Bandung: Mpress, 2009), h.672

Hajji Wada'. Sebagian yang lain menyatakan dilakukan ketika perang tabuk serta sebagian yang lain mengatakan hal itu dilakukan pada pelaksanaan Qadha Umrah.

Beliau berpendapat bahwa karena terjadinya perselisihan waktu pada periwayatan hadis itu maka hal tersebut menunjukkan bahwa hadis itu adalah dhaif dan bohong, yang tujuannya adalah untuk mendukung dan melegalkan pendapat Umar. Dan apabila berita tersebut dikiaskan dengan periwayatan-periwayatan yang diambil dari kitab sahih ulama Sunni, serta dari rujukan-rujukan ulama besar Sunni, beliau menemukan bahwa hadis-hadis tersebut lemah dan tidak memiliki kekuatan sedikit pun.³¹

Begitu juga perkataan Umar yang beliau ambil dari kitab-kitab Sunni yaitu “Ada dua mut’ah pada masa Rasulullah dan saya telah mengharamkan keduanya.” Kata-kata Umar lain menyebutnya, “keduanya telah dihapus”, juga dalam riwayat lain dikatakan, “saya mengharamkannya”.

Selain itu, Ayatullah Sayid Muhammad al-Musawi juga mengemukakan bahwa jika diperhatikan lebih jauh lagi, seandainya kata-kata itu berupa ayat al-Quran yang sifatnya menghapus ayat mut’ah, tentu beliau juga akan bersandar padanya. Dan apabila itu merupakan perkataan Rasulullah tentu beliau juga akan menjadikannya sebagai dalil atas dihapuskannya nikah mut’ah. Namun persoalannya adalah kata-kata tersebut diucapkan secara pribadi oleh Umar bin Khatab langsung. Jadi apakah mungkin kata-kata Umar dapat menghapus ayat al-Quran?

³¹ Ayatullah Sayyid Muhammad al-Musawi, *Mazhab Pencinta Keluarga Nabi*, penerjemah Muthahari Press (Bandung: Mpress, 2009), h.674

C. Praktek Nikah Mut'ah dalam Kalangan Syi'ah

Perkawinan mut'ah ialah ikatan tali perkawinan antara seorang lelaki dengan wanita, dengan mahar yang telah disepakati, yang disebut dalam akad, sampai pada batas waktu yang telah ditentukan. Dengan berlalunya waktu yang telah disepakati, atau dengan pengurangan batas waktu yang diberikan oleh laki-laki, maka berakhirlah ikatan pernikahan tersebut tanpa memerlukan proses perceraian.

Syarat sah dalam nikah mut'ah ini harus dipenuhi semuanya, diantaranya; baligh, berakal, tidak ada suatu halangan syar'i bagi terjadinya perkawinan tersebut seperti adanya nasab, saudara sesusu, masih menjadi istri orang lain, iddah, atau menjadi saudara perempuan istrinya (ipar) sebagaimana yang telah disebutkan dalam kitab-kitab fiqh.³²

Sebelum membicarakan cara melakukan nikah mut'ah, alangkah baiknya kalau pembaca terlebih dahulu memahami beberapa hal berikut:

Pertama, kepastian bahwa wanita-wanita yang akan dinikahi baik secara mut'ah atau lainnya, tidak sedang dalam larangan-larangan keagamaan, seperti istri orang, masih menjalani iddah baik karena kematian atau perceraian, ikatan nasab

³² Ja'far Murtadho al-'Amili, *Nikah Mut'ah dalam Islam kajian Ilmiah dari berbagai mazhab* (Surakarta: Yayasan Abna' al Husain, 2002), h.27

dari segala bentuknya yang dilarang oleh agama untuk dinikahi, atau masih dalam lamaran orang.³³

Kedua, wanita secara fitrah membutuhkan seorang pendamping yang dapat mengayomi dan menjaga dirinya dari segala sesuatu yang tidak dia inginkan selain kebutuhan biologisnya, dia akan merasa bangga apabila pendampingnya seorang yang benar-benar dia dambakan, dan yang dia dambakan memang relative sekali disejumlah wanita, ada harta, kesempurnaan fisik, ilmu dan dedikasi yang tinggi, biologis dan lain sebagainya.³⁴

Yang kalau dipaksakan pada seorang pria bukan idamannya dia akan kecewa dan Islam melarang untuk mengecewakan orang lain siapapun dia, karena kelembutan dan rasa ingin diayomi oleh seorang pendamping adalah fitrah wanita, maka Islam menentukan hak memilih calon pendampingnya adalah mutlak milik wanita.³⁵

Sebaliknya karena lelaki yang dipilih, Islam memberinya hak untuk menolak sebelum terjadinya pernikahan atau melepasnya (talaq) apabila sudah terjadi

³³ Ja'far Murtadho al-'Amili, *Nikah Mut'ah dalam Islam kajian Ilmiah dari berbagai mazhab* (Surakarta: Yayasan Abna' al Husain, 2002), h.185

³⁴ Ja'far Murtadho al-'Amili, *Nikah Mut'ah dalam Islam kajian Ilmiah dari berbagai mazhab* (Surakarta: Yayasan Abna' al Husain, 2002), h.186

³⁵ Ja'far Murtadho al-'Amili, *Nikah Mut'ah dalam Islam kajian Ilmiah dari berbagai mazhab* (Surakarta: Yayasan Abna' al Husain, 2002), h.186

pernikahan, sehingga masing-masing punya hak, nikah milik wanita dan talaq milik lelaki (selain nikah mut'ah), dengan begitu tidak ada yang didholimi haknya.³⁶

Tetapi apabila dilihat dari apa yang sudah ditradisikan oleh masyarakat bahwa hak pilih hanya ada pada kaum lelaki baik dia sebagai ayah atau lainnya, terutama dalam menentukan penamping hidupnya, dan kedholiman itu ditambah lagi dengan hak talaq atau pelepasan juga ditangan kaum lelaki.

Maka jelas hak wanita banyak ternodai oleh ulah tradisi bukan syareat agama, sebagaimana yang banyak didengungkan oleh lawan-lawan Islam, yang berakibat timbulnya konsep emansipasi wanita yang keterlaluan disegala bidang. Pada intinya hak nikah adalah hak kaum wanita, apapun statusnya baik dia gadis atau janda secara mutlak.

Ketiga, ada hal lain yang juga harus diketahui sebelum melakukan nikah yaitu masalah perwalian dan perzinaan seorang anak terutama perempuan saat hendak melakukan nikah, secara umum teori Islam tentang hak nikah sudah disinggung, bahwa hak nikah sepenuhnya milik wanita, apapun bentuk nikah yang akan dia jalani dan pada siapapun lelaki idaman dia jatuhkan pilihannya, yang kalau disimpulkan secara umum wanita yang sehat akal nya sebagaimana lelaki, dia adalah wali

³⁶ Ja'far Murtadho al-'Amili, *Nikah Mut'ah dalam Islam kajian Ilmiah dari berbagai mazhab* (Surakarta: Yayasan Abna' al Husain, 2002), h.186

terhadap dirinya sendiri, dengan begitu kata izin sebenarnya tidak harus dia lakukan.³⁷

Terjadi perselisihan diantara ulama madzhab, ada diantara mereka yang mengharuskan izin bahkan nikah dianggap tidak sah tanpa izin orang tua, walaupun pendapat semacam itu lebih terkesan memihak terhadap ketetapan orang tua.

Tetapi hak sianak banyak ternodai, sehingga banyak terjadi perselisihan pendapat antara anak dengan orang tuanya, yang tidak jarang diantara mereka menentukan sikap yang dapat merugikan keduanya (orang tua maupun anak).

Agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ada pendapat lain yang membagi izin dalam dua bentuk: Pertama, izin yang diartikan hanya sekedar pemberitahuan, dan itu dilakukan untuk sikap kesopanan, sebagai contoh seorang anak yang hendak berangkat ke sekolah di pagi hari, kemudian dia mengucapkan izin dihadapan orang tuanya, maka izin semacam itu hanyalah sikap sopan sianak terhadap kedua orang tuanya, karena diizinkan atau tidak dia tetap harus berangkat ke sekolah. Kedua, izin yang diartikan suatu ketetapan hukum, sebagai contoh, ada seorang yang minta izin hendak memakai sesuatu yang bukan menjadi miliknya, maka izin atau tidaknya mengandung suatu ketetapan hukum halal atau haram. Yang

³⁷ Ja'far Murtadho al-'Amili, *Nikah Mut'ah dalam Islam kajian Ilmiah dari berbagai mazhab* (Surakarta: Yayasan Abna' al Husain, 2002), h.189

apabila diterjang dia akan mendapatkan dosa dan dapat membatalkan shalat, apabila alat-alat shalat yang dipakai tanpa seizin pemiliknya.³⁸

Adapun izin dalam pernikahan sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa nikah adalah hak wanita sepenuhnya, karena kalau tidak maka hak anak akan terampas dan jelas bertentangan dengan konsep Islam, maka yang paling tepat makna izin dalam nikah adalah untuk makna yang pertama karena, karena pada makna yang kedua pelaku izin menunjukkan bahwa dia tidak memiliki hak apapun atas apa yang dia minta, sedang anak tetap memiliki hak, dan keberadaan hak tersebut diakui oleh Islam.³⁹

Dengan begitu perselisihan yang terjadi diantara ulama madzhab hanya agar sianak menghormati orang tuanya dan untuknya sianak harus atau setidaknya sangat dianjurkan untuk melakukan izin, tetapi bukan menafikkan haknya, dan pendapat yang menetapkan izin, mereka bukan tidak menuntut agar orang tua juga mempermudah perizinan anaknya, karena orang tua yang baik ialah orang tua yang membantu anaknya untuk berbakti kepadanya.⁴⁰

Keempat, ada hal lain yang lain yang tidak kalah penting yang juga harus diketahui adalah masalah saksi dalam sebuah pernikahan, apabila dilihat dari

³⁸ Ja'far Murtadho al-'Amili, *Nikah Mut'ah dalam Islam kajian Ilmiah dari berbagai mazhab* (Surakarta: Yayasan Abna' al Husain, 2002), h.191

³⁹ Ja'far Murtadho al-'Amili, *Nikah Mut'ah dalam Islam kajian Ilmiah dari berbagai mazhab* (Surakarta: Yayasan Abna' al Husain, 2002), h.192

⁴⁰ Ja'far Murtadho al-'Amili, *Nikah Mut'ah dalam Islam kajian Ilmiah dari berbagai mazhab* (Surakarta: Yayasan Abna' al Husain, 2002), h.192

peruntukannya, maka saksi dalam segala hal diadakan untuk memperkuat bukti sesuatu yang telah terjadi, keharusan dan tidaknya keberadaan saksi sangat bergantung pada penting dan tidaknya sesuatu yang akan dilakukan.

Kelima, nikah mut'ah sebagaimana sudah dijelaskan diatas adalah ajaran Islam, tertera dalam al-Quran surah an-Nisa ayat 24, ayat tersebut dengan beberapa dalil naqli maupun aqli belum dihapus hukum halalnya, bahkan tidak mungkin hukum tersebut akan dihapus, karena nikah mut'ah adalah jalan keluar bagi problema biologis, agar tidak jatuh pada sesuatu yang diharamkan baik zina, onani, lesbi, atau homo lainnya. Karena orang yang melakukan sikap-sikap semacam itu menurut al-Quran tergolong kelewatan, sebagaimana yang diterangkan pada surah al-Mu'minin ayat 6-7.

Karena ayat tersebut telah menyebutkan kemudahan jalan keluarnya, maka jelas yang melanggar adalah orang-orang yang keterlaluan, karena yang dihalalkan sudah cukup mudah, dan pasti yang keterlaluan akan mendapatkan balasannya.

Mungkin akan dianggap benar sebuah pelanggaran, apabila aturannya terlalu sulit untuk dilakukan, karena fitrah manusia selalu ingin jalan pintas (jalan yang mudah), tetapi apabila jalan yang sudah cukup luas dan mudah untuk dilalui masih juga memilih jalan yang sangat sempit, dan tubuhnya pasti tergores oleh dinding penyekatnya.

Dengan keterangan diatas maka jelaslah bahwa nikah mut'ah bukan ajaran kaum Syi'ah semata, walaupun harus diakui bahwa mereka lebih dahulu gigih dalam memperjuangkan halalnya nikah mut'ah tersebut, karena nikah tersebut dijelaskan dalam al-Quran, dan al-Quran bukan hanya milik orang syi'ah. Tetapi milik kaum muslimin seutuhnya, dengan begitu siapapun yang akan melakukannya, dia dibenarkan oleh syari'at berdasarkan ayat tersebut. Dan sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin seutuhnya bahwa siapa pun yang mengingkari satu ayat dalam al-Qur'an, baik secara keberadaannya atau secara fungsionalnya, maka dia dianggap keluar dari agama Islam.

Keenam, ada hal lucu yang apabila didengar, yaitu kata-kata bahwa wanita lebih banyak dirugikan dalam nikah mut'ah, untuk menjelaskan hal yang sebenarnya, pembaca harus membaca kembali penjelasan diatas, bahwa hak nikah secara mutlak adalah hak wanita.⁴¹

Dia mau melakukan apapun bentuk nikah yang dikehendaki atau tidak sama sekali itu adalah haknya, karena sudah dijelaskan bahwa wanita dengan fitrah kelembutannya adalah dasar untuk memilih siapa saja yang dia anggap layak untuk menjadi pendampingnya, dan nikah mana yang lebih layak darinya.

Dengan begitu apabila nikah terjadi berarti apa yang menjadi haknya telah dia lakukan, dan tidak seorangpun yang mengurangi haknya, karena pilihan yang

⁴¹ Ja'far Murtadho al-'Amili, *Nikah Mut'ah dalam Islam kajian Ilmiah dari berbagai mazhab* (Surakarta: Yayasan Abna' al Husain, 2002), h.200

terjadi adalah kesukaan hatinya, dengan pengertian semacam ini tidak ada seorang pun wanita yang dirugikan oleh lawannya, karena dia melakukannya dengan senang hati, kalau terjadi salah pilih baik orang maupun jenis nikah yang dia lakukan, maka itu adalah kesalahannya sendiri, bukan syari'atnya.⁴²

Karena tidak ada aturan atau syari'at yang diciptakan untuk merugikan pelakunya, dan nikah mut'ah ditetapkan sebagai jalan keluar terhadap problema biologisnya, adapun kekal tidaknya sebuah pernikahan adalah hal lain. Memang tidak ada kebahagiaan yang abadi dan kesusahan yang abadi di dunia ini.⁴³

Ketujuh, selain itu yang juga harus diketahui bahwa nikah saat melakukannya memiliki banya motifasi, ada karena cinta, karena iba, karena untuk menciptakan ikatan makhromiyah, karena kebutuhan biologis, untuk menemaninya dalam perjalanan, untuk senang-senang, untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap bulannya, dan masih banyak lagi.⁴⁴

Tidak benar kalau nikah hanya memiliki motifasi membina istri kemudian, melahirkan anak dengan segala kesulitannya, dan yang tidak memiliki motifasi itu dikategorikan zina, sebagai contoh ada yang mengatakan bahwa nikah yang ada (daim) banyak membatasi ruang gerak seorang wanita terutama bisnis women,

⁴² Ja'far Murtadho al-'Amili, *Nikah Mut'ah dalam Islam kajian Ilmiah dari berbagai mazhab* (Surakarta: Yayasan Abna' al Husain, 2002), h.201

⁴³ Ja'far Murtadho al-'Amili, *Nikah Mut'ah dalam Islam kajian Ilmiah dari berbagai mazhab* (Surakarta: Yayasan Abna' al Husain, 2002), h.201

⁴⁴ Ja'far Murtadho al-'Amili, *Nikah Mut'ah dalam Islam kajian Ilmiah dari berbagai mazhab* (Surakarta: Yayasan Abna' al Husain, 2002), h.204

karena dia harus mengurus anak, suami disamping bisnisnya, adalagi yang melakukan nikah tetapi tidak mendambakan anak, lalu dia mencari wanita yang diketahui benar-benar mandul.⁴⁵

Dari penjelasan diatas sebagai muqodimah bagi seorang yang hendak melakukan nikah apapun bentuknya, baik daim (permanen) maupun mut'ah (sementara), dapat disimpulkan bahwa kedua bentuk nikah tersebut, salah satunya tidak dikhususkan untuk janda atau gadis, misalnya nikah mut'ah untuk janda sedang daim untuk gadis, tetapi alangkah baiknya jika mengikuti aturan-aturan yang telah dijelaskan.

Selanjutnya kita akan membahas tentang cara melakukan nikah mut'ah, sebagaimana telah disebutkan bahwa hak nikah mut'ah adalah milik wanita, maka yang mengucapkan ijab adalah wanita, (walaupun ada mazhab yang membolehkan si wanita untuk mewakili pengucapan kalimat nikah pada calon suaminya) ada beberapa kalimat yang dipakai dalam nikah mut'ah yaitu:

Matta'tuka nafsi, Angkahtuka nafsi atau ***Zawwajtuka nafsi*** artinya aku kawinkan diriku padamau, ***Bi-mahri*** artinya dengan maskawin (adapun besar kecilnya mas kawin ditentukan bersama sebelum melakukan nikah tersebut), jangan lupa ditambah dengan pembatasan waktu, dengan ucapan ***Limuddati*** artinya untuk

⁴⁵ Ja'far Murtadho al-'Amili, *Nikah Mut'ah dalam Islam kajian Ilmiah dari berbagai mazhab* (Surakarta: Yayasan Abna' al Husain, 2002), h.204

batas waktu (lama tidaknya masa pernikahan juga menjadi kesepakatan bersama sebelum melakukan nikah).⁴⁶

Apabila kalimat tersebut (batas waktu tertentu) terlupakan, dia akan berubah menjadi nikah permanen dengan segala hukum dan aturannya, kalima tersebutlah yang membedakan antara nikah mut'ah dengan nikah daim.⁴⁷

Dan qabulnya dilakukan oleh pihak laki-laki, denga kalimat, *Qobiltu* artinya aku terima, karena nikah menurut sebagian ulama mazhab harus diucapkan dalam bahasa arab, maka setidaknya pelaku nikah harus memahami arti-artinya walaupun secara global, kecuali memang benar-benar lemah untuk mengucapkannya, maka dia boleh untuk mengucapkannya dengan bahasa lain yang sesuai maksudnya denga bahasa Arab.⁴⁸

Kalimat ijab dengan qobulnya apabila disatukan dalam susunanya, maka bunyinya sebagai berikut: *Angkahtuka nafsi bi mahri asyrot aalaaf rubbiyah li muddati yaum.*⁴⁹

⁴⁶ Ja'far Murtadho al-'Amili, *Nikah Mut'ah dalam Islam kajian Ilmiah dari berbagai mazhab* (Surakarta: Yayasan Abna' al Husain, 2002), h.205

⁴⁷ Ja'far Murtadho al-'Amili, *Nikah Mut'ah dalam Islam kajian Ilmiah dari berbagai mazhab* (Surakarta: Yayasan Abna' al Husain, 2002), h.206

⁴⁸ Ja'far Murtadho al-'Amili, *Nikah Mut'ah dalam Islam kajian Ilmiah dari berbagai mazhab* (Surakarta: Yayasan Abna' al Husain, 2002), h.206

⁴⁹ Ja'far Murtadho al-'Amili, *Nikah Mut'ah dalam Islam kajian Ilmiah dari berbagai mazhab* (Surakarta: Yayasan Abna' al Husain, 2002), h.206

Kalimat yang ada pada mas kawin boleh diganti dengan beberapa kalimat berikut: asyrot aalaaf rubbiyah (Rp. 10.000,-), Isyriin alf rubbiyah (Rp. 20.000,-), Khomsiin alf rubbiyah (Rp. 50.000,-), Miata alf rubbiyah (Rp. 100.000,-), miatain alf rubbiyah (Rp.200.000,-) dan lainnya, yang fungsinya (mas kawin) menurut Islam adalah menghalalkan seseorang untuk mendekati lawan jenisnya, baik dengan bersetubuh atau tidak, oleh sebab itu dia yang harus mengucapkannya dengan kerelaan hati tanpa ada pihak manapun yang memaksanya.⁵⁰

Sedang kekosongan yang ada pada jangka waktu (*li muddati*) boleh diisi dengan beberapa pilihan sebagai berikut: Yaum (sehari), Yaumain (dua hari) Tsalasata ayyam (tiga hari), U'sbu' (seminggu), Syhr (sebulan), Syhrain (dua bulan), Tsalasata Asyhur (tiga bulan), Sanah (setahun), sanatain (dua tahun), Tsalasata sanawat (tiga tahun) dan lainnya.⁵¹

Apabila jangka waktu yang telah disepakati habis, maka untuk memperpanjangnya harus mengulangi akad nikah baru (tanpa harus menjalani iddah), tetapi sebaliknya apabila sebelum masa yang disepakati tiba sudah ingin berpisah, maka kedua belah pihak sepakat untuk mempercepat masanya dengan saling merekan sisa waktu, yang mestinya dia jalani bersama sebagai suami istri. Dan pihak wanita dilarang menikah dengan lelaki lain selama satu kali (terhitung

⁵⁰ Ja'far Murtadho al-'Amili, *Nikah Mut'ah dalam Islam kajian Ilmiah dari berbagai mazhab* (Surakarta: Yayasan Abna' al Husain, 2002), h.206

⁵¹ Ja'far Murtadho al-'Amili, *Nikah Mut'ah dalam Islam kajian Ilmiah dari berbagai mazhab* (Surakarta: Yayasan Abna' al Husain, 2002), h.206

dari pelepasan), bagi mereka yang masih menstruasi, atau 45 hari bagi mereka yang tidak menstruasi (mereka harus melakukan iddah).⁵²

Hal tersebut diharuskan dalam Islam untuk membersihkan rahim dari benih-benih laki-laki sebelumnya, apabila semasa nikah dia melakukan kontak fisik, tetapi apabila dia tidak melakukan semua itu, yakni dia boleh langsung melakukan nikah kembali dengan laki-laki yang dia senangi. Sedang pihak laki-laki apabila merestui dengan ketentuan-ketentuan diatas, dia menjawab: *Qobiltu*. Sebaliknya apabila dia tidak merestui jumlah mas kawin atau jangka waktu yang ditentukan oleh pihak wanita, maka dia harus melakukan musyawarah kembali beberapa jumlah yang disepakati.⁵³

D. Kemuskilan-kemuskilan dalam Nikah Mut'ah

Sebagian orang kurang menyenangi atau kurang sependapat dengan perkawinan semacam ini, bahkan ada diantara mereka yang membencinya, walaupun diantara mereka ada yang mengatakan bahwa perkawinan tersebut halal.

Seandainya nikah mut'ah akan memudahkan kehidupan free sex, maka dalam nikah permanen juga akan mengalami hal yang sama. Dan seandainya dikatakan nikah mut'ah dapat menjerumuskan wanita kedalam kerusakan, maka dalam nikah mut'ah akan terjadi hal yang serupa. Apalagi dengan banyaknya frekuensi perceraian.

⁵² Ja'far Murtadho al-'Amili, *Nikah Mut'ah dalam Islam kajian Ilmiah dari berbagai mazhab* (Surakarta: Yayasan Abna' al Husain, 2002), h.207

⁵³ Ja'far Murtadho al-'Amili, *Nikah Mut'ah dalam Islam kajian Ilmiah dari berbagai mazhab* (Surakarta: Yayasan Abna' al Husain, 2002), h.207

Ada yang menyebutkan bahwa perkawinan mut'ah dapat merendahkan martabat dan kepribadian kaum wanita, karena ia seolah-olah menyewakan dirinya untuk kaum lelaki bagi pelampiasan syahwatnya dengan imbalan sebagian dari hartanya.

Perkataan seperti ini aneh sekali bila didengar, karena pemberian mahar atau mas kawin dianggap upah, kemudian perempuan tersebut disamakan dengan perempuan bayaran. Kemudian apakah pembayaran mahar atau mas kawin tersebut dapat merendahkan martabat kaum wanita? Apakah kalau tanpa mahar dapat dikatakan menghormatinya? Dan apakah kesenangan dalam perkawinan ini hanya dinikmati oleh kaum lelaki? Ataupun kaum wanita juga merasakan manfaat yang sama?⁵⁴

Kenapa perkataan seperti ini tidak diucapkan juga pada perkawinan permanen yang justru lebih cocok menjadi alamat tuduhan tersebut. Dalam nikah permanen tidak ada suatu kebebasan memilih bagi seorang wanita. Dia terbelenggu atas kemauan kaum lelaki sepanjang hidupnya, jika pihak laki-laki menghendaki yang demikian.⁵⁵

⁵⁴ Ja'far Murtadho al-'Amili, *Nikah Mut'ah dalam Islam kajian Ilmiah dari berbagai mazhab* (Surakarta: Yayasan Abna' al Husain, 2002), h.16

⁵⁵ Ja'far Murtadho al-'Amili, *Nikah Mut'ah dalam Islam kajian Ilmiah dari berbagai mazhab* (Surakarta: Yayasan Abna' al Husain, 2002), h.16

Ada pula yang mengatakan tentang pudarnya masa depan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mut'ah, karena tidak adanya kasih sayang, pemeliharaan, dan kehidupan yang tenang dibawah perlindungan kedua orang tua.

Perkawinan sementara mungkin akan menghasilkan anak, karena itu adalah hubungan khusus antara dua orang. Apakah mungkin pria dapat mengingkari kebapaknya atas si anak? Si ayah tidak dapat mengingkari kebapaknya hanya sekedar adanya kemungkinan, kecuali dia benar-benar dapat memastikan bahwa si anak yang lahir bukan berasal darinya. Ini dari satu sisi. Adapun dari sisi lain, bila kita dapat memastikan kebapaknya terhadap anak ini melalui suatu penelitian yang cukup seksama terhadap golongan darah atau sarana apa pun yang lain, dimana dengannya dapat dipastikan atau dapat diperoleh kepuasan yang mendekati keyakinan bahwa anak ini memang anak laki-laki ini, maka kita dapat menetapkan keabsahannya.⁵⁶

Sebenarnya telah kita katakan bahwa urusan kehamilan dan kelahiran merupakan pilihan kedua mempelai dalam perjanjian perkawinan. Keduanya boleh menolak persoalan tersebut; terutama pada masa seperti sekarang ini terdapat banyak kemudahan untuk mencegah kehamilan.⁵⁷

⁵⁶ Sayid Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia waita dalam Islam*, penerjemah Muhammad Abdul Qadir Alkaf, (Jakarta: Lentera, 2000), h.300

⁵⁷ Ja'far Murtadho al-'Amili, *Nikah Mut'ah dalam Islam kajian Ilmiah dari berbagai mazhab* (Surakarta: Yayasan Abna' al Husain, 2002), h.18

Akan tetapi bila kedua mempelai berkehendak menanggung beban pemeliharaan anak-anak, maka Islam tidak melarangnya dengan syarat bahwa keduanya harus menanggung beban tersebut secara sempurna, sebagaimana yang berlaku dalam nikah da'im apabila terjadi perceraian.

Kalau keduanya tidak mau menanggung pemeliharaan bayi tersebut, maka syariat tetap memaksa keduanya untuk melakukan hal tersebut seperti halnya yang biasa terjadi dalam pernikahan permanen. Kedua orang tuanya dipaksa untuk merawat bayi-bayi mereka apabila terjadi perceraian.

Kemudian kalau memang dianggap benar bahwa nikah mut'ah akan menelantarkan anak-anak maka syariat seharusnya lebih dahulu mengetahui apa yang akan terjadi. Sehingga yang lebih pantas dilarang adalah "Hukum Talak" dalam nikah da'im. Agar kasus semacam ini tidak terjadi.⁵⁸

Dengan adanya anak, bukankah penolakan masyarakat terhadap perkawinan sementara menjadi sebab penolakan mereka terhadap anak, dan tentu kesempatan mereka untuk mengecap pendidikan secara baik terancam? Ada satu permasalahan yang harus digarisbawahi memperbincangkan masalah ini, yaitu bahwa sikap masyarakat yang negatif terhadap perkawinan apa pun akan membawa pengaruh negatif atas apa saja yang berasal darinya, baik itu perkawinan permanen atau perkawinan sementara. Masyarakat biasanya menolak perkawinan yang keluar dari

⁵⁸ Ja'far Murtadho al-'Amili, *Nikah Mut'ah dalam Islam kajian Ilmiah dari berbagai mazhab* (Surakarta: Yayasan Abna' al Husain, 2002), h.19

sistem sosialnya yang dijadikan pedomannya, dan penolakan ini berimbas pada anak-anak yang lahir darinya. Pada sistem kasta misalnya jika seorang lelaki menikah dengan wanita yang tidak berasal dari kasta sosialnya, maka masyarakat akan menolaknya dan penolakan ini akan berdampak negatif atas anak-anak yang lahir darinya. Masalah ini kita juga kita temukan dalam sistem kesukuan atau sistem rasialis dan lain-lain.⁵⁹

Oleh karena itu, pandangan negatif tidak hanya tertuju pada perkawinan sementara, tetapi ia juga tertuju pada perkawinan yang menentang adat-istiadat (budaya) masyarakat.

Masalah anak-anak tidak dapat dipecahkan kecuali dengan cara mengubah pandangan masyarakat terhadap masalah itu sendiri yang menyebabkan penolakan mereka. Dengan itu, anak yang lahir dari perkawinan sementara akan menjalani kehidupan secara wajar sebagaimana anak yang lahir dari perkawinan permanen. Ironis sekali, kita saksikan bahwa anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah (hubungan gelap) di Barat, dapat hidup secara wajar karena adanya perangkat hukum yang mengakuinya dan memasukkannya sebagai bagian dari anggota masyarakat.⁶⁰

Sesungguhnya anak yang lahir dari perkawinan sementara tidak selalu pasti akan ditolak oleh masyarakat, kecuali jika itu bertabrakan dengan budaya sosial

⁵⁹ Sayid Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia waita dalam Islam*, penerjemah Muhammad Abdul Qadir Alkaf, (Jakarta: Lentera, 2000), h.301

⁶⁰ Sayid Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia waita dalam Islam*, penerjemah Muhammad Abdul Qadir Alkaf, (Jakarta: Lentera, 2000), h.301

mereka. Oleh karena itu, jika kedua orang tuanya membawanya di suatu masyarakat yang tidak mengetahui bahwa anak itu dari perkawinan sementara atau mereka tidak menolak perkawinan itu, maka anak itu dapat hidup secara normal.⁶¹

Kami tidak mengingkari adanya dampak-dampak negatif atas si anak dalam keadaan seperti ini, namun itu tidak hanya terbatas pada perkawinan sementara bahkan juga berlaku pada perkawinan-perkawinan lain yang ditolak oleh masyarakat.

Sedangkan pemberian nafkah terhadap istri selama proses nikah mut'ah dan pemeliharaan anak dari hasil nikah mut'ah itu tergantung dari perjanjian kedua belah pihak sebelum melakukan akad nikah, disinilah titik berat yang mesti disepakati oleh pihak laki-laki sebagai sebuah persyaratan yang harus di penuhi sebelum memut'ah sorang wanita. Semua telah diatur dalam perjanjian kedua pihak, bagaimana pemberian nafkah selama perkawinan, siapa yang akan memelihara anak ketika ada anak dari hasil perkawinan itu.

Dari hal diatas kita mampu melihat bahwa dari pihak perempuanlah yang berhak mengajukan sebuah persyaratan yang mesti dipenuhi oleh pihak laki-laki termasuk pemberian nafkah selama proses nikah mut'ah dan siapa yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan anak jika ada anak dari hasil nikah mut'ah dan pemeliharaan anak setelah nikah mut'ah itu berakhir. Jika pihak laki-pihak laki-laki

⁶¹ Sayid Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia waita dalam Islam*, penerjemah Muhammad Abdul Qadir Alkaf, (Jakarta: Lentera, 2000), h.301

tidak mampu memenuhi syarat dari pihak wanita maka pihak wanita berhak menolak untuk di nikah mut'ah.

Sejauh yang penulis teliti dan analisis yang berkaitan dengan nikah mut'ah dari kedua mazhab diatas yakni Sunni dan Syi'ah tidak ada satupun yang memaparkan langsung bahwa Nabi pernah mengharamkan nikah mut'ah serta alasan bahwa surah an-Nisa ayat 24 telah di nasakh atau di mansukh oleh surah al-Mu'minin. Tidaklah relefan karena tidak mungkin ayat yang lebih dlu turun memansukh yang turun belakangan. Serta tidak ada kaidah yang menjelaskan bahwa hadis mampu menghapus ayat al-Qur'an. Sebab karena alasan inilah dan hasil analisis ini penulis berpendapat bahwa nikah mut'ah dibolehkan atau tidaklah haram. Mengatakan boleh atau halalnya nikah mut'ah bukan berarti ingin melakukannya atau harus melakukannya seperti halnya tentang poligami, kita sama-sama mengetahui hukum kebolehan dan kehalalan poligami namun bukan berarti kita ingin melakukannya.

Keberadann nikah mut'ah dalam Islam bukan berarti wajib bagi setiap orang untuk melakukannya, sebagaimana halnya tidak semua yang dihalalkan atau diperintahkan oleh syariat disenangi oleh semua orang.⁶²

⁶² Ja'far Murtadho al-'Amili, *Nikah Mut'ah dalam Islam kajian Ilmiah dari berbagai mazhab* (Surakarta: Yayasan Abna' al Husain, 2002), h.15

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Landasan hukum pengharaman nikah mut'ah pada kalangan mazhab Sunni adalah bahwa surah an-Nisa ayat 24 yaitu ayat nikah mut'ah telah dinasakh oleh surah al-Mu'minin ayat 6-7 dan beberapa hadis tentang keharaman nikah mut'ah yang dijadikan rujukan oleh mazhab sunni adalah hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Shahih Bukhari dan Muslim dimana Nabi saw mengharamkan mut'ah pada waktu perang Khaibar serta hadis keharaman nikah mut'ah pada waktu penaklukan Mekah dan Tahun 'Autas hingga diharamkan sampai hari kiamat. Sedangkan landasan hukum kehalalan nikah mut'ah pada kalangan mazhab Syi'ah adalah dalil al-Quran surah an-Nisa ayat 23-24 dan mengutamakan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ahlulbait.
2. Alasan penolakan ulama Sunni terhadap praktek nikah mut'ah yaitu menurut mereka nikah mut'ah merupakan perkawinan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam karena hanya mempermainkan perasaan wanita, menelantarkan anak dan dapat dijadikan sebagai sarana pelegalan pelacuran. Sedangkan ulama syi'ah beranggapan bahwa nikah mut'ah tidaklah seperti apa yang ulama sunni katakan. Pada dasarnya nikah

mut'ah dan nikah da'im itu sama yang membedakan hanyalah batas waktu, keharusan memberi nafkah, saling mewarisi atau adanya kehamilan yang seluruhnya diatur menurut perjanjian mereka bersama sebelum melangsungkan pernikahan.

B. Implikasi

1. Agar perbincangan nikah mut'ah selalu aktual, diharapkan bagi pengkaji hukum Islam hendaknya dapat memaparkan secara netral, gamblang dan objektif pandangan-pandangan berbagai mazhab tanpa melibatkan rasa fanatisme.
2. Bagi para cendekiawan muslim, diharapkan dapat berpikir lebih arif, bijaksana dan objektif dalam menyikapi problematika hukum Islam yang terjadi dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Abidin, Zainal. *Imamah dan Implikasinya dalam Kehidupan Sosial*. Jakarta: Balitbang Kemenag RI, 2012.

Al-Amili, Ja'far Murthada, *Nikah Mut'ah dalam islam Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Muhammad Jawad. Jakarta: as-Sajad, 1992.

Al-Bukhari, Muhammad b Isma'il. *sahih al-Bukhari*, Riyad: Dar-‘Alam al-Kutub, 1996.

Al-Farmawi, Abd. Hayy. *Metode Tafsir al-Mawdhu'i: Suatu Pengantar*, terj. Suryan A. Jamrah. Jakarta: Grafindo Persada, 1996.

Ali, H. Busyairi. *Nikah Mut'ah Halal atau haram*. Cet I; Banjarmasin: Ar-Risalah Islamic Centre Foundation, 2012.

Al-jaza'ir i, Abd al-Rahman, *Kitab al-Fiqh*.

Arikuknto, Suharismi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1995.

Baker, Anton. *Metode-Metode Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisus, 1986.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*. Semarang: PT. Toha Putra, 1996.

DEPDIKBUD. *kamus besar bahasa indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995

Djamil, Fathurrahman. *filsafat Hukum Islam*. Cet. Ke-3; Jakarta: Logos, 1999¹
Thabathaba'i, Muhammad Husein. *Al-Mizan Fi Tafsir al-Qur'an jilid 4*. Qum Iran: Mansyurat Jama'ah al-Mudarisin Fi al-Hauzah 'Ilmiyah, 1997.

Fahruddin, Fuad Mohd. *kawin mut'ah dalam pandangan Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.

- Fakhrurrazi, *al-Tafsir al-Kabir*, Jilid 4. Beirut: Dar Ihya al-Taratsi al-Arabiyy, 2001.
- Faza, Asrar Maburur. *Syi'ah dalam Kitab Sunni*. Medan: Perdana Publishing, 2015.
- Hamdani, Muhammad Faisal. *Nikah Mut'ah Analisis Perbandingan Hukum Antara Sunni dan Syi'ah*. Jakarta: Gaya Media Pratama 2008.
- Hasan, M.Ali. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Husain Fadhlullah, Sayid Muhammad. *Dunia waita dalam Islam*, penerjemah Muhammad Abdul Qadir Alkaf. Jakarta: Lentera, 2000.
- Ibn Ya'kub al-Kulaini, Abu Ja'far Muhammad. *al-Kafi* juz 5. Qum Iran: Dar al-adhwa, 1996.
- J.Moleong, Steven Adam. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.
- Jalaluddin al-Suyuti, *al-Dur al-Mantsur*, Juz 2.
- Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipiner*. Yogyakarta: Pradigma, 2012..
- Kartono, Kartini. *Pengantar metodologi Research*. Bandung: Tarsiti, 2000.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir al-Qur'an al-Azim*. Beirut: Maktabah an-Nur al-Ilmiyah, 1991.
- Kraemer, Joel L. *Renaissance Islam*. Bandung: Mizan, 2003.
- Machasin, *Nikah Mut'ah: Kajian atas Argumentasi Syi'ah, Musawa, Jurnal Studi Gender*, Vol 1 No.2. Pusat Studi Wanita: IAIN Sunan Kalijaga, , 2002.
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* Jakarta: Rineka Cipta..
- Mustafa, Ibnu. (ed.), *perkawinan Mut'ah dalam Perspektif Hadis dan Tinjauan Masa Kini*. Jakarta: Lentera Basritama, 1999.

Nawawi. *Al Minhaj Syarj Shahih Muslim bin Hajjaj jilid 9*, bab Nikah al-Mut'ah. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiy, 2001.

Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003.

Rahman, Abdur. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Retnowati, Ratih. *Resistensi Perempuan dalam Institusi Kawin Mut'ah, RENAI Jurnal Politik Lokal & Sosial-Humaniora*. Salatiga: Pustaka Percik, 2004.

Shihab, Quraish. *perempuan: dari cinta sampai seks dari nikah mut'ah sampai nikah biasa dari bias lama sampai bias baru*. Jakarta: Lentera Hati, 2005

Shihab, Quraish. *Sunnah-Syiah, Bergandengan tangan, Mungkinkah? Kajian atas Konsep dan Pemikiran*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Subhani, Ja'far. *Yang Hangat dan Kontroversial dalam Fikih, alih bahasa Irwan Kurniawan*, Cet. I; Jakarta: Lentera, 1999.

Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Thabathaba'i, *Mengungkap Rahasia al-Quran*, terj. A Malik Madani dan Hamim Ilyas. Bandung: Mizan, 1994.

Thabaththaba'i, Allamah MH. *Shi'ite Islam* (terj), Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989.

Zahra, Muhammad Abu. *Aliran Politik dan Aqidah dalam Islam* (terj). Jakarta: Gaya Media Pertama, 2011..

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nur Aimmah yang akrab di panggil Imma, lahir di Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 7 Oktober 1996 anak ke-2 (Dua) dari dua bersaudara. Terlahir dari kedua orang tua yang sangat mulia, Ayahanda Muhammad Alwi dan Ibunda Rajemiati.

Pendidikan formal dimulai pada tahun 2000 di Tk Pertiwi X Kab. Sinjai dan selesai pada tahun 2002. Melanjutkan pendidikan di tahun yang sama tahun 2002 di SD 103 Bontompare Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai dan selesai di tahun 2008, kemudian melanjutkan ke bangku SMP di SMP Negeri 2 Sinjai Utara dan lulus pada tahun 2011. Kemudian penulis lanjut mendaftarkan dirinya di SMA Negeri 2 yang kini telah menjadi SMA Negeri 5 Sinjai dan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sekolah yaitu karate dan dinyatakan lulus SMA pada tahun 2014, tidak sampai disitu penulis melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar melalui Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan lulus di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan hingga tahun 2018.